

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 97 TAHUN 2011
TENTANG
TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK (METODE TIGA ANGKA DASAR)

000 UMUM

| | |
|------------|--|
| 000 | UMUM |
| 001 | Lambang |
| .1 | Garuda |
| .2 | Bendera Kebangsaan |
| .3 | Daerah |
| .31 | Provinsi |
| .32 | Kabupaten/Kota |
| 002 | Tanda Kehormatan/Penghargaan untuk pegawai lihat 861.1 |
| .1 | Bintang |
| .2 | Satya Lencana |
| .3 | Parasamya Karya Nugraha |
| .4 | Monumen |
| .5 | Penghargaan Secara Adat |
| .6 | Penghargaan Lainnya |
| 003 | Hari Raya/Besar |
| .1 | Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan dan sebagainya |
| .2 | Hari Raya Keagamaan |
| .3 | Hari Ulang Tahun |
| .4 | Hari-hari Besar Internasional |
| 004. | Ucapan |
| .1 | Ucapan Terima Kasih |
| .2 | Ucapan Selamat |
| .3 | Ucapan Belasungkawa |
| .4 | Ucapan Lainnya |
| 005 | Undangan |
| 006 | Tanda Jabatan |
| .1 | Pamong Praja |
| .2 | Tanda Pengenal |
| .3 | Pejabat Lainnya |
| 007 | - |
| 008 | - |
| 009 | - |
| 010 | URUSAN DALAM |
| 011 | Gedung Kantor/termasuk Instalasi Prasarana Fisik Pamong Praja/Kantor Dinas |
| 012 | Rumah Dinas |
| .1 | Tanah Untuk Rumah Dinas |
| .2 | Perabot Rumah Dinas |
| .3 | Rumah Dinas Golongan I |
| .4 | Rumah Dinas Golongan II |
| .5 | Rumah Dinas Golongan III |
| .6 | Rumah/Bangunan Lainnya |
| .7 | Rumah Pejabat Negara |
| 013 | <i>Mess/Guest House</i> |
| 014 | RumahSusun / Apartemen |
| 015 | Penerangan Listrik/Jasa Listrik |

- 016 Telepon/*Faximile*/Internet
- 017 Keamanan/Ketertiban Kantor
- 018 Kebersihan kantor
- 019 Protokol
 - .1 Upacara Bendera
 - .2 Tata Tempat
 - .21 Pemasangan Gambar Presiden/Wakil Presiden
 - .3 Audiensi/Menghadap Pimpinan
 - .4 Alamat-alamat Kantor dan Pejabat
 - .5 Bandir/Umbul-umbul/Spanduk

020 PERALATAN

- .1 Penawaran
- 021 Alat Tulis
- 022 Mesin Kantor
- 023 Perabot Kantor
- 024 Alat Angkutan
- 025 Pakaian Dinas
- 026 Senjata
- 027 Pengadaan
 - .1 Jasa non Fisik
 - .2 Jasa Fisik
 - .3 Konstruksi
 - .4 Non Konstruksi
 - .5 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
- 028 Inventaris
- 029 -

030 KEKAYAAN DAERAH

- 031 Sumber Daya Alam
- 032 Asset Daerah
- 033 -
- 034 -
- 035 -
- 036 -

040 PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI

- 041 Perpustakaan
 - .1 Umum
 - .2 Khusus
 - .3 Perguruan Tinggi
 - .4 Sekolah
 - .5 Keliling
- 042 Dokumentasi
- 043 -
- 044 -
- 045 Kearsipan
 - .1 Pola Klasifikasi
 - .2 Penataan Berkas
 - .3 Penyusutan Arsip
 - .31 Jadual Retensi Arsip
 - .32 Pemindahan Arsip
 - .33 Penilaian Arsip
 - .34 Pemusnahan arsip
 - .35 Penyerahan Arsip
 - .36 Berita Acara Penyusutan Arsip
 - .37 Daftar Pertelaan

- .4 Pembinaan Kearsipan
- .41 Bimbingan Teknis
- .5 Pemeliharaan/Perawatan Arsip
- .51 -
- .6 Pengawetan
- 046 Sandi
- 047 -
- 048 -
- 049 -

050 PERENCANAAN

- .1 Repelita/8 Sukses (RPJM)
- .11 Pelita Daerah (RPJMD)
- .12 Bantuan Pembangunan Daerah
- .13 Bappeda
- 051 Proyek Bidang Pemerintahan Klasifikasikan di sini : Proyek Prasarana Fisik Pemerintahan tambahkan perincian 100 pada 051
Contoh : Proyek Kepenjaraan : 051.86
- 052 Bidang Politik
- 053 Bidang Keamanan dan Ketertiban tambahkan perincian 300 pada 053
Contoh : Proyek ketataprajaan: 053.311
- 054 Bidang Kesejahteraan Rakyat tambahkan perincian 400 pada 054
Contoh: Proyek Resettlement Desa: 054.671
- 055 Bidang perekonomian tambahkan perincian 500 pada 055
Contoh: Proyek Pasar: 055.112
- 056 Bidang Pekerjaan Umum tambahkan perincian 600 pada 056
Contoh: Proyek Jembatan: 056.3
- 057 Bidang Pengawasan
- 058 Bidang Kepegawaian
- 059 Bidang Keuangan

060 ORGANISASI/KETATALAKSANAAN

- .1 Program Kerja
- 061 Organisasi Instansi Pemerintah Struktur Organisasi
 - .1 Susunan dan Tata Kerja
 - .2 Tata Tertib Kantor, Jam Kerja di Bulan Puasa
- 062 Organisasi Badan Non Pemerintah
- 063 Organisasi Badan Internasional
- 064 Organisasi Badan Semi Pemerintah, BKS-AKSI
- 065 Ketatalaksanaan/Tata Naskah/Sistem
- 066 Stempel Dinas
- 067 Pelayanan Umum
- 068 Komputerisasi/Siskomdagri
- 069 Analisis dan Formasi Jabatan
 - .1 Kompetensi Pegawai
 - .2 Uraian Jabatan
 - .3 Peningkatan Kinerja
 - .4 Budaya Kerja
 - .5 Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)

070 PENELITIAN

- 071 Riset
- 072 Survey
- 073 Kajian
- 074 Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi
- 075 Departemen
- 076 Non Departemen

- 077 Privinsi
- 078 Kabupaten/Kota
- 079 Kecamatan/Desa

080 KOFERENSI/RAPAT/SEMINAR

- 081 Gubernur
- 082 Bupati/Walikota
- 083 Komponen, eselon lainnya
- 084 Instansi Lainnya
- 085 Internasional di Dalam Negeri
- 086 Internasional di Luar Negeri
- 087 -
- 088 -
- 089 -

090 PERJALANAN DINAS

- 091 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Daerah
- 092 Perjalanan Menteri ke Daerah
- 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
- 094 Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan pegawai
- 095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
- 096 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Luar Negeri
- 097 Perjalanan Menteri ke Luar Negeri
- 098 Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri
- 099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri

100 PEMERINTAHAN

Meliputi : Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, Hubungan Luar Negeri

100 PEMERINTAHAN

- 101 GDN (Gerakan Disiplin Nasional)
- 102 -
- 103 -
- 104 -

110 PEMERINTAHAN PUSAT

- 111 Presiden
 - Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah, dan Serah Terima Jabatan
 - .1 Pertanggungjawaban Presiden Kepada MPR
 - .2 Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan/Pidato
- 112 Wakil Presiden
 - Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah, dan Serah Terima Jabatan
 - .1 Pertanggungjawaban Wakil Presiden Kepada MPR
 - .2 Amanat Wakil Presiden/Amanat Kenegaraan/Pidato
- 113 Susunan Kabinet
 - .1 *Reshuffle*
 - .2 Penunjukan Menteri *ad interim*
 - .3 Sidang Kabinet
- 114 Departemen Dalam Negeri
 - .1 Amanat Menteri Dalam Negeri
- 115 Departemen Lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara
- 117 Lembaga Pemerintahan Non Departemen

- 118 Otonomi/Desentralisasi/Dekonsentrasi
119 Kerjasama Antar Departemen
120 PEMERINTAH PROVINSI
.04 Laporan Daerah
.042 Monografi Tambahkan kode wilayah
.1 Koordinasi
.2 Instansi Tingkat Provinsi
.21 Dinas Otonomi
.22 Instansi Vertikal
.23 Kerjasama Antar Provinsi/Daerah
121 Gubernur tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dan sebagainya.
122 Wakil Gubernur tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dan sebagainya
123 Sekretaris Wilayah Daerah tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan.
124 Badan- badan Pertimbangan Daerah, meliputi:
.1 Muspida
.2 Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)
.3 Forum Koordinasi lainnya
125 Pembentukan/ Pemekaran Wilayah
.1 Pembinaan/ Perubahan Nama Kepada: Daerah, Kota, Benda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas Laut, dan sebagainya.
.2 Pembentukan Wilayah Pembantu Gubernur, Wilayah Administratif, Bakorwil.
.3 Perubahan Batas Wilayah.
.4 Pemekaran Wilayah
126 Pembagian Wilayah
127 Penyerahan Urusan
128 Swapraja/ Penataan Wilayah/Daerah
129 -

130 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
131 Bupati/ Walikota, tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan, Meninggal, Memori Kepala Daerah, dan sebagainya.
.1 Sambutan/ Pengarahan/ Amanat
132 Wakil Bupati/ Walikota, tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dan sebagainya.
133 Kabupaten/Kota, tambahkan kode wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, dan sebagainya
134 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah
.1 Muspida
.2 Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)
.3 Forum Koordinasi lainnya
.4 Kerjasama antar Kabupaten/Kota
135 Pembentukan/ Pemekaran Wilayah
.1 -
.2 Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/Walikota
.3 -
.4 Perubahan Batas Wilayah
.5 Pemekaran Wilayah
.6 Permasalahan Batas Wilayah

- .7 Pembentukan Ibukota/Kotamadya
- .8 Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan.
- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Penyerahan Urusan
- 138 Pemerintah Wilayah Kecamatan
 - .1 Sambuatan/Pengarahan/Amanat
 - .2 Pembentukan Kecamatan
 - .3 Pemekaran Kecamatan
 - .4 Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan
 - .5 Pembentukan Perwakilan Kecamatan/Kemantren
 - .6 -
 - .7 -
- 139 -

140 PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

- 141 Pamong Desa, meliputi : pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan sebagainya
- 142 Penghasilan Pamong Desa
- 143 Kekayaan Desa
- 144 Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembug Desa
- 145 Administrasi Desa
- 146 Kewilayahan
 - .1 Pembentukan Desa/Kelurahan
 - .2 Pemekaran Desa/Kelurahan
 - .3 Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/Kelurahan
 - .4 Perubahan Nama Desa/Kelurahan
 - .5 Kerjasama antar Desa/Kelurahan
- 147 Lembaga-lembaga Tingkat Desa, Jangan Klasifikasikan di sini, lihat 410 dengan perinciannya
- 148 Perangkat Kelurahan
 - .1 Kepala Kelurahan
 - .2 Sekretaris Kelurahan
 - .3 Staf Kelurahan
- 149 Dewan Kelurahan
 - .1 Rukun Tetangga
 - .2 Rukun Warga
 - .3 Rukun Kampung

150 LEGISLATIF MPR/DPR/DPD

- 151 Keanggotaan MPR
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pemberhentian
 - .3 Recall
 - .4 Pelanggaran
- 152 Persidangan
- 153 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 154 Hak
- 155 Keanggotaan DPR Pencalonan Pengangkatan
- 156 Persidangan Sidang Pleno Dengar-Pendapat Rapat Komisi Reses
- 157 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 158 Jawaban Pemerintah
- 159 Hak

160 DPRD PROVINSI TAMBAHKAN KODE WILAYAH

| | |
|-----|--------------------------|
| 161 | |
| .1 | Keanggotaan |
| .2 | Pencalonan |
| .3 | Pengangkatan |
| .4 | Pemberhentian |
| .5 | Recall |
| .6 | Meninggal |
| .7 | Pelanggaran |
| 162 | Persidangan |
| .1 | Reses |
| 163 | Kesejahteraan |
| .1 | Keuangan |
| .2 | Penghargaan |
| 164 | Hak |
| 165 | Sekretaris DPRD Provinsi |
| 166 | - |
| 167 | - |
| 168 | - |
| 169 | - |

170 DPRD KABUPATEN TAMBAHKAN KODE WILAYAH

| | |
|-----|--------------------------------|
| 171 | Keanggotaan |
| .1 | Pencalonan |
| .2 | Pengangkatan |
| .3 | Pemberhentian |
| .4 | Recall |
| .5 | Meninggal |
| 172 | Persidangan |
| 173 | Kesejahteraan |
| .1 | Keuangan |
| .2 | Penghargaan |
| 174 | Hak |
| 175 | Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota |
| 176 | - |
| 177 | - |
| 178 | - |
| 179 | - |

180 HUKUM

| | |
|--------|---------------------------------------|
| .1 | Konstitusi |
| .11 | Dasar Negara |
| .12 | Undang-Undang Dasar |
| .2 | Garis Besar Haluan Negara |
| 181 | Pendata |
| .1 | Tanah |
| .2 | Rumah |
| .3 | Utang/Piutang |
| .31 | Gadai |
| .32 | Hipotik |
| .4 | Notariat |
| 182 | Pidana |
| .1 | Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) |
| 183 | Peradilan |
| | Peradilan Agama Islam, lihat 451.6 |
| | Peradilan Perkara Tanah, lihat 593.71 |
| .1 | Bantuan Hukum |
| 184.31 | Hukum Internasional |

| | |
|------|--|
| 185 | Imigrasi |
| .1 | <i>Visa</i> |
| .2 | <i>Pasport</i> |
| .3 | <i>Exit</i> |
| .4 | <i>Reentry</i> |
| .5 | Lintas Batas |
| 186 | Kepenjaraan |
| 187 | Kejaksaan |
| 188 | Peraturan Perundang-undangan |
| .1 | TAP MPR |
| .2 | Undang-Undang |
| .3 | Peraturan |
| .31 | Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden |
| .32 | Peraturan Menteri |
| .33 | Peraturan Lembaga Non Departemen |
| .34 | Peraturan Daerah |
| .341 | Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Gubernur |
| .342 | Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Walikota |
| .4 | Keputusan |
| .41 | Presiden |
| .42 | Menteri |
| .43 | Lembaga Pemerintah Non Departemen |
| .44 | Gubernur |
| .45 | Bupati/Walikota |
| .5 | Instruksi |
| .51 | Presiden |
| .52 | Menteri |
| .53 | Lembaga Pemerintah Non Departemen |
| .54 | Gubernur |
| .55 | Bupati/Walikota |
| 189 | Hukum Adat |
| .1 | Tokoh Adat/Masyarakat |

190 HUBUNGAN LUAR NEGERI

| | |
|-----|-------------------------------|
| 191 | Perwakilan Asing |
| 192 | Tamu Negara |
| 193 | Kerjasama dengan Negara Asing |
| .1 | ASEAN |
| .2 | Bantuan Luar Negeri |
| 194 | Perwakilan RI di Luar Negeri |
| 195 | PBB |
| 196 | Laporan Luar Negeri |
| 197 | - |
| 198 | - |
| 199 | - |

200 POLITIK

200 POLITIK

| | |
|-----|--------------------|
| 201 | Kebijkasanaan Umum |
| 202 | Orde Baru |
| 203 | Reformasi |
| 204 | - |
| 205 | - |
| 206 | - |

210 KEPARTAIAN

| | |
|-----|----------------|
| 211 | Lambang Partai |
|-----|----------------|

| | |
|-----|--|
| 212 | Kartu Tanda Anggota |
| 213 | Bantuan Keuangan Parpol |
| 214 | Komposisi Kepengurusan |
| 215 | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| .1 | Bendahara Partai |
| 216 | Tempat / Kedudukan / Alamat |
| 217 | - |
| 218 | - |
| 219 | - |

220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN

| | |
|-----|--|
| 221 | Berdasarkan Perjuangan |
| .1 | Perintis Kemerdekaan |
| .2 | Angkatan '45 |
| .3 | Veteran |
| 222 | Berdasarkan Kekaryaannya |
| .1 | PEPABRI |
| .2 | WREDA TAMA |
| 223 | Berdasarkan Kerohanian / Agama |
| 224 | Lembaga Adat |
| 225 | Penghayatan Kepercayaan |
| 226 | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / Yayasan |
| .1 | Pemerhati Lingkungan Hidup / Kesehatan |
| .2 | Pemerhati Pendidikan |
| .3 | Pemerhati Sosial |
| .4 | Pemerhati HAM / Demokrasi / Hukum |
| .5 | Pemerhati Amal |
| .6 | Pemerhati Pemerintahan |
| .7 | Pemerhati Bencana Alam |
| .8 | Pemerhati Kerukunan Hidup |
| .9 | Pemerhati Tenaga Kerja |
| 227 | - |
| 228 | - |
| 229 | - |

230 ORGANISASI PROFESI

| | |
|-----|---|
| 231 | Ikatan Profesi Kesehatan |
| .1 | IDI (Ikatan Dokter Indonesia) |
| .2 | PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) |
| .3 | PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) |
| .4 | IBI (Ikatan Bidan Indonesia) |
| .5 | Persatuan Ahli Gizi Indonesia |
| 232 | Persatuan Guru Republik Indonesia |
| 233 | Persatuan Sarjana Hukum Indonesia |
| 234 | Persatuan Advokat Indonesia |
| 235 | Lembaga Bantuan Hukum Indonesia |
| .1 | Ikatan Notaris Indonesia |
| 236 | Korps Pegawai Republik Indonesia |
| 237 | Persatuan Wartawan Indonesia |
| 238 | Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia |
| 239 | Ikatan Pustakawan Indonesia |

240 ORGANISASI PEMUDA

| | |
|-----|----------------------------------|
| 241 | Komite Nasional Pemuda Indonesia |
| 242 | Organisasi Mahasiswa |
| 243 | Organisasi Pelajar |
| 244 | Gerakan Pemuda Ansor |

| | |
|-----|--------------------------------|
| 245 | Gerakan Pemuda Islam Indonesia |
| 246 | Gerakan Pemuda Marhaenis |
| 247 | - |
| 248 | - |
| 249 | - |

250 ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKATAN

| | |
|-----|---|
| 251 | Federasi Buruh Seluruh Indonesia |
| 252 | Organisasi Buruh Internasional |
| 253 | Himpunan Kerukunan Tani Indonesia |
| 254 | Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia |
| 255 | Keluarga Sopir Profesional Seluruh Indonesia (SPSI) |
| 256 | Gabungan Pengusaha Ojek Seluruh Indonesia (GAPOKSI) |
| 257 | - |
| 258 | - |
| 259 | - |

260 ORGANISASI WANITA

| | |
|-----|---------------------------------|
| 261 | Dharma Wanita |
| 262 | Kongres Wanita Indonesia |
| 263 | Pemberdayaan Perempuan (Wanita) |
| 264 | Kongres Wanita |
| 265 | - |
| 266 | - |
| 267 | - |
| 268 | - |
| 269 | - |

270 PEMILIHAN UMUM

| | |
|-----|--|
| 271 | Pencalonan |
| 272 | Nomor Urut Partai/Tanda Gambar |
| 273 | Kampanye/Dana |
| 274 | Petugas Pemilu |
| 275 | Pemilih/ Daftar Pemilih |
| 276 | Sarana Logistik |
| .1 | TPS |
| .2 | Surat Suara |
| .3 | Kotak Suara |
| .4 | Tinta / Alat Tulis |
| 277 | Pemungutan Suara/Penghitungan Suara |
| 278 | Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD, DPD |
| 279 | Sarana Penyelenggara Pemilu |
| .1 | Kantor |
| .2 | Kendaraan |

280 PELANGGARAN PEMILU

| | |
|-----|----------|
| .1 | di TPS |
| .2 | di PPK |
| .3 | Kampanye |
| 281 | - |
| 282 | - |
| 283 | - |
| 284 | - |
| 285 | - |
| 286 | - |
| 287 | - |
| 288 | - |

289 -
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -
295 -
296 -
297 -
298 -
299 -

300 KEAMANAN/ KETERTIBAN

300 KEAMANAN/ KETERTIBAN
301 Ketentraman dan Ketertiban Umum
302 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah
303 Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
304 -
305 -
306 -
307 -
308 -
309 -

310 PERTAHANAN

311 Darat
312 Laut
313 Udara
314 Perbatasan
315 -
316 -
317 -
318 -
319 -

320 KEMILITERAN

321 Latihan Militer
322 Wajib Militer
323 Operasi Militer
324 Kekayaan TNI Pejabat Sipil dari TNI
.1 AMD
.2 -
325 -
326 -
327 -
328 -
329 -

330 KEAMANAN

331 Kepolisian

| | |
|-----|-----------------------|
| .1 | Polisi Pamong Praja |
| .2 | Kamra |
| .3 | Kamling |
| .4 | Jaga Wana |
| 332 | Huru-hara/Demonstrasi |
| 333 | Senjata Api/Tajam |
| 334 | Bahan Peledak |
| 335 | Pejudian |
| 336 | Surat-surat Kaleng |
| 337 | Pengaduan |
| 338 | Himbauan/Larangan |
| 339 | - |

340 PERLINDUNGAN MASYARAKAT

| | |
|-----|-------------------------------|
| 341 | Latihan Dasar |
| 342 | Bencana |
| .1 | Pengurangan Resiko |
| .2 | Laporan |
| .3 | Bantuan |
| .4 | Peralatan Penanggulangan |
| .5 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi |
| 343 | - |
| 344 | - |
| 345 | - |
| 346 | - |
| 347 | - |
| 348 | - |
| 349 | - |

350 KEJAHATAN

| | |
|-----|--|
| 351 | Makar/Pemberontak |
| 352 | Pembunuhan |
| 353 | Penganiayaan, Pencurian / Perampasan |
| 354 | Subversi/Penyelundupan/Narkotika |
| 355 | Pemalsuan |
| 356 | Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan/KKN |
| 357 | Pemeriksaan/Perbuatan Cabul |
| 358 | Kenakalan |
| 359 | Kejahatan lainnya |

360 BENCANA

| | |
|-----|-------------------------------|
| 361 | Gempa Bumi |
| 362 | Banjir |
| 363 | Angin Topan |
| 364 | Kebakaran |
| .1 | Pemadam Kebakaran |
| 365 | Kekeringan |
| 366 | Tsunami |
| 367 | Gunung Api |
| 368 | Gerakan Tanah / Tanah Longsor |
| 369 | - |

370 KECELAKAAN (Klasifikasi di sini : SAR)

| | |
|-----|-------|
| 371 | Darat |
| 372 | Udara |
| 373 | Laut |

374 Sungai/Danau
375 -
376 -
377 -
378 -
379 -

380 -

381 -
382 -
383 -
384 -
385 -
386 -
387 -
388 -
389 -

390 -

391 -
392 -
393 -
394 -
395 -
396 -
397 -
398 -
399 -

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

401 Keluarga Miskin
402 -
403 -
404 -
405 -
406 -
407 -
408 -
409 -

410 PEMBANGUNAN DESA

411 Pembinaan Usaha Gotong-royong
 .1 Swadaya Gotong-royong
 .11 Penataan Gotong-royong
 .12 Gotong-royong Dinamis
 .13 Gotong-royong Statis
 .14 Pungutan
 .2 Lembaga Sosial Desa (LSD)
 .21 Pembinaan
 .22 Klasifikasi
 .23 Proyek
 .24 Musyawarah
 .3 Latihan Kerja Masyarakat
 .31 Kader Masyarakat
 .32 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 .33 Pusat Latihan
 .34 Kursus – kursus

| | |
|-----|---|
| .35 | Kurikulum/Sylabus |
| .36 | Keterampilan |
| .37 | Pramuka |
| .4 | Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) |
| .41 | Program |
| .42 | Pembinaan Organisasi |
| .43 | Kegiatan |
| .5 | Penyuluhan |
| .51 | Publikasi |
| .52 | Peragaan |
| .53 | Sosio Darma |
| .54 | Siaran Pedesaan |
| .55 | Penyuluhan Lapangan |
| .6 | Kelembagaan Desa |
| .61 | Kelompok Tani |
| .62 | Rukun Tani |
| .63 | Subak |
| .64 | Dharma Tirta |
| 412 | Perekonomian Desa |
| .1 | Produksi Desa |
| .11 | Pengolahan |
| .12 | Pemasaran |
| .2 | Keuangan Desa |
| .21 | Perkreditan Desa |
| .22 | Inventarisasi Data |
| .23 | Perkembangan/Pelaksanaan |
| .24 | Bantuan/Stimulans |
| .25 | Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan |
| .3 | Koperasi Desa |
| .31 | Badan Usaha Unit Desa (BUUD) |
| .32 | Koperasi Usaha Desa (KUD) |
| .4 | Penataan Bantuan Pembangunan Desa |
| .41 | Jumlah Desa yang diberi bantuan |
| .42 | Pengarahan |
| .43 | Pusat |
| .44 | Daerah |
| .5 | Alokasi Bantuan Pembangunan Desa |
| .51 | Pusat |
| .52 | Daerah |
| .6 | Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa |
| .61 | Bantuan Langsung |
| .62 | Bantuan Keserasian |
| .63 | Bantuan Juara Lomba Desa |
| 413 | Prasarana Desa |
| .1 | Prasarana Desa |
| .11 | Pembinaan |
| .12 | Bimbingan Teknis |
| .2 | Pemukiman kembali penduduk |
| .21 | Lokasi |
| .22 | Diskusi |
| .23 | Pelaksanaan |
| .3 | Masyarakat Pradesa |
| .31 | Pembinaan |
| .32 | Penyuluhan |
| .4 | Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa |
| .41 | Rumah Sehat |
| .42 | Proyek Perintis |
| .43 | Pelaksanaan |
| .44 | Pengembangan |
| .45 | Perbaikan Kampung |

- 414 Pengembangan Desa
 - .1 Tingkat Perkembangan Desa
 - .11 Jumlah Desa
 - .12 Pemekaran Desa
 - .13 Pembentukan Desa Baru
 - .14 Evaluasi
 - .15 Bagan
 - .2 Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP)
 - .21 Penyuluhan Program
 - .22 Lokasi UDKP
 - .23 Pelaksanaan
 - .24 Bimbingan/Pembinaan
 - .25 Evaluasi
 - .3 Tata Desa
 - .31 Inventarisasi
 - .32 Penyusunan Pola Tata Desa
 - .33 Aplikasi Tata Desa
 - .34 Pemetaan
 - .35 Pedoman Pelaksanaan
 - .36 Evaluasi
 - .4 Perlombaan Desa
 - .41 Pedoman
 - .42 Penilaian
 - .43 Kejuaraan
 - .44 Piagam
- 415 Koordinasi
 - .1 Sektor Khusus (K)
 - .2 Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
 - .3 Tim Koordinasi Pusat (TKP)
 - .4 Kerjasama
 - .41 Luar Negeri (UNICEF)
 - .42 Perguruan Tinggi
 - .43 Departemen/Lembaga Non Departemen
- 416 -
- 417 -
- 418 -
- 419 -

- 420 **PENDIDIKAN****
 - .1 Pendidikan Khusus. Klasifikasi di sini: Pendidikan Putra-putri Irian Jaya
- 421 Sekolah
 - .1 Pra Sekolah
 - .2 Sekolah Dasar
 - .3 Sekolah Menengah
 - .4 Sekolah Tinggi
 - .5 Sekolah Kejuruan
 - .6 Kegiatan Sekolah, Dies Natalis, Lustrum
 - .7 Kegiatan Pelajar
 - .71 Reuni, Dharmawisata
 - .72 Pelajar Teladan
 - .73 Resimen Mahasiswa (MENWA)
 - .74 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
 - .8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
 - .9 Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf
- 422 Administrasi Sekolah
 - .1 Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, MOS, Ospek
 - .2 Tujuan Belajar

- .3 Hari Libur
- .4 Uang Sekolah, Klasifikasi di sini SPP
- .5 Bea Siswa
- 423 Metode Belajar
 - .1 Kuliah
 - .2 Ceramah, Simposium
 - .3 Diskusi
 - .4 Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tur
 - .5 Kurikulum
 - .6 Karya Tulis
 - .7 Ujian
- 424 Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor,
Klasifikasi di sini: Guru Teladan
- 425 Sarana Pendidikan
 - .1 Gedung
 - .11 Gedung Sekolah
 - .12 Kampus
 - .13 Pusat Kegiatan Mahasiswa
 - .2 Buku
 - .3 Perlengkapan Sekolah
- 426 Keolahragaan
 - .1 Cabang Olahraga
 - .2 Sarana
 - .21 Gedung Olahraga
 - .22 Stadion
 - .23 Lapangan
 - .24 Kolam Renang
 - .3 Pesta Olah Raga, Klasifikasi di sini: PON, Porsade, Olimpiade, dan sebagainya
 - .4 KONI
- 427 Kepemudaan, meliputi: Organisasi dan Kegiatan Remaja
Klasifikasi di sini: Gelanggang Remaja
- 428 Kepramukaan
- 429 Pendidikan Kedinasan untuk Departemen Dalam Negeri, lihat 890

- 430 KEBUDAYAAN**
- 431 Kesenian
 - .1 Cabang Kesenian
 - .2 Sarana
 - .21 Gedung Kesenian
- 432 Kepurbakalaan
 - .1 Museum
 - .2 Peninggalan Kuno
 - .21 Candi, termasuk Pemugaran
 - .22 Benda
- 433 Sejarah
- 434 Bahasa
- 435 Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan
- 436 Kepercayaan
- 437 Cagar Budaya
- 438 Nilai Budaya
- 439 Perfilman

- 440 KESEHATAN**
- 441. Pembinaan Kesehatan
 - .1 Gigi
 - .2 Mata
 - .3 Jiwa
 - .4 Kanker

- .5 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- .6 Perawatan
- .7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
- .8 Pekan Imunisasi Nasional
- 442. Obat-obatan
 - .1 Pengadaan
 - .2 Penyimpanan
 - .3 Pengiriman / Pendistribusian
- 443. Penyakit Menular
 - .1 Pencegahan
 - .2 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)
 - .21 Kusta
 - .22 Kelamin
 - .23 Frambosia
 - .24 TBC/AIDS/HIV
 - .3 Epidemiologi & Karantina (Epidka)
 - .31 Kholera
 - .32 Imunisasi
 - .33 Surveilense
 - .34 Rabies (anjing gila)
 - .4 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
 - .41 Malaria
 - .42 Dengue Haemorrhagie Fever (Demam Berdarah) (DHF)
 - .43 Filaria
 - .44 Serangga
 - .5 Hygiene Sanitasi
 - .51 Tempat-tempat Pembuatan dan Penjualan Makanan dan Minuman (TPPMM)
 - .52 Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga (Samijaga)
 - .53 Pestisida
- 444. Gizi
 - .1 Kekurangan makanan, bahaya kelaparan, busung lapar
 - .2 Keracunan makanan
 - .3 Menu Makanan Rakyat
 - .4 Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPG)
 - .5 Progam Makanan Tambahan Makanan Anak Sekolah (PMT-AS)
- 445 Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Poliklinik
- 446 Tenaga Medis
- 447 Alat Medis
- 448. Pengobatan Tradisional
 - .1 Pijat
 - .2 Tusuk Jarum
 - .3 Jamu Tradisional
 - .4 Dukun
- 449. -

- 450. **AGAMA**
- 451. Islam
 - .1 Peribadatan
 - .11 Sholat
 - .12 Zakat, Fitrah
 - .13 Puasa
 - .14 MTQ
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama
 - .4 Pendidikan
 - .41 Tinggi

| | |
|------------|--|
| .42 | Menengah |
| .43 | Dasar |
| .44 | Pondok Pesantren |
| .45 | Gedung Sekolah |
| .46 | Tenaga Pengajar |
| .47 | Buku |
| .48 | Dakwah |
| .49 | Organisasi/Lembaga Pendidikan |
| .5 | Harta Agama Wakaf, Baitulmal, dan sebagainya |
| .6 | Peradilan |
| .7 | Organisasi Keagamaan Bukan Politik Majelis Ulama |
| .8 | Mazhab |
| 452 | Protestan |
| .1 | Peribadatan |
| .2 | Rumah Ibadah |
| .3 | Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine |
| .4 | Mazhab |
| .5 | Organisasi Gerejani bukan politik |
| 453 | Katholik |
| .1 | Peribadatan |
| .2 | Rumah Ibadah |
| .3 | Tokoh Agama, Rohaniawan, Pastor. |
| .4 | Mazhab |
| .5 | Organisasi Gerejani bukan politik |
| 454 | Hindu |
| .1 | Peribadatan |
| .2 | Rumah Ibadah |
| .3 | Tokoh agama |
| .4 | Mazhab |
| .5 | Organisasi Keagamaan bukan politik |
| 455 | Budha |
| .1 | Peribadatan |
| .2 | Rumah Ibadah |
| .3 | Tokoh agama, Rohaniawan |
| .4 | Mazhab |
| .5 | Organisasi Keagamaan Bukan Politik |
| 456 | Urusan Haji |
| .1 | ONH |
| .2 | Manasik |
| 457 | - |
| 458 | - |
| 459 | - |
| 460 | SOSIAL |
| 461 | Rehabilitasi Penderita Cacat |
| .1 | Cacat Mata |
| .2 | Cacat Tubuh |
| .3 | Cacat Mental |
| .4 | Bisu/tuli |
| 462 | Tuna Sosial |
| .1 | Gelandangan |
| .2 | Pengemis |
| .3 | Tuna Susila |
| .4 | Anak Nakal |
| 463 | Kesejahteraan Anak/Keluarga |
| .1 | Anak Putus Sekolah |
| .2 | Ibu Teladan |
| .3 | Anak Asuh |
| 464 | Pembinaan Pahlawan |

- .1 Pahlawan, meliputi: Penghargaan kepada Pahlawan, Tunjangan kepada Pahlawan dan Jandanya.
- .2 Perintis Kemerdekaan, meliputi: Pembinaan, Penghargaan dan Tunjangan kepada Perintis Kemerdekaan dan Jandanya.
- .3 Cacat Veteran
- 465 Kesejahteraan Sosial
 - .1 Lanjut Usia
 - .2 Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi
- 467 Sumbangan Sosial
 - .1 Korban Bencana
 - .2 pencarian dana untuk sumbangan
 - .3 penyelenggarakan undian ketangkasan, bazar dan sebagainya
 - .4 Panti asuhan
 - .5 Panti Jompo
- 467 Bimbingan Sosial
 - .1 Masyarakat Suku Terasing, meliputi: Bimbingan Pendidikan, Kesehatan Pemukiman
- 468 PMI
- 469 Makam
 - .1 Umum
 - .2 Pahlawan
 - .3 Khusus Keluarga, Raja
 - .4 Krematorium
- 470 KEPENDUDUKAN**
- 471 Pendaftaran Penduduk
 - .1 Identitas Penduduk
 - .11 Biodata
 - .12 Nomor Induk Kependudukan
 - .13 Kartu Tanda Penduduk
 - .14 Kartu Keluarga
 - .15 Advokasi Identitas Penduduk
 - .2 Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia
 - .21 Perpindahan Penduduk WNI
 - .22 Perpindahan Penduduk WNA dalam Wilayah Indonesia
 - .23 Perpindahan Penduduk WNA dan WNI tinggal sementara
 - .24 Daerah terbelakang
 - .25 Bedol Desa
 - .3 Perpindahan Penduduk antar Negara
 - .31 Penduduk Indonesia ke Luar Negeri
 - .32 Orang Asing tinggal sementara
 - .33 Orang Asing tinggal tetap
 - .34 Perpindahan Penduduk antar Negara di Wilayah perbatasan antar Negara (Pelintas Batas Tradisional)
 - .4 Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan
 - .41 Akibat Bencana Alam
 - .42 Akibat Kerusakan Sosial
 - .43 Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang
 - .44 Pendaftaran Penduduk Rentan
- 472 Pencatatan Sipil
 - .1 Kelahiran, Kematian dan Advokasi
 - .11 Kelahiran
 - .12 Kematian
 - .13 Advokasi Kematian dan Kelahiran
 - .2 Perkawinan, Perceraian dan Advokasi
 - .21 Perkawinan Agama Islam
 - .22 Perkawinan Agama Non Islam
 - .23 Perceraian Agama Islam
 - .24 Perceraian Agama Non Islam

| | |
|-----|---|
| .25 | Advokasi Perkawinan dan Perceraian |
| .3 | Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta dan Advokasi |
| .31 | Pengangkatan Anak |
| .32 | Pengakuan Anak |
| .33 | Pengesahan Anak |
| .34 | Perubahan Akta |
| .35 | Pembatalan Akta |
| .36 | Advokasi Pengurusan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta |
| .4 | Pencatatan Kewarganegaraan |
| .41 | Akibat Perkawinan |
| .42 | Akibat Kelahiran |
| .43 | Non Perkawinan |
| .44 | Non Kelahiran |
| .45 | Perubahan WNI ke WNA |
| 473 | Informasi Kependudukan |
| .1 | Teknologi Informasi |
| .11 | Perangkat Keras |
| .12 | Prangkat Lunak |
| .13 | Jaringan Komunikasi Data |
| .2 | Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi |
| .21 | Daerah Maju |
| .22 | Daerah Berkembang |
| .23 | Daerah Terbelakang |
| .3 | Pengolahan Data Kependudukan |
| .31 | Pendaftaran Penduduk |
| .32 | Kejadian Vital Penduduk |
| .33 | Penduduk Non Registrasi |
| .4 | Pelayanan Informasi Kependudukan |
| .41 | Media Elektronik |
| .42 | Media Cetak |
| .43 | <i>Outlet</i> |
| 474 | Perkembangan Penduduk |
| .1 | Pengarahan Kuantitas Penduduk |
| .11 | Struktur Jumlah |
| .12 | Komposisi |
| .13 | Fertilitas |
| .14 | Kesehatan Reproduksi |
| .15 | Morbiditas Penduduk |
| .16 | Mortalitas Penduduk |
| .2 | Pengembangan Kualitas Penduduk |
| .21 | Anak dan Remaja |
| .22 | Penduduk Usia Produktif |
| .23 | Penduduk Usia Lanjut |
| .24 | <i>Gender</i> |
| .3 | Penataan Persebaran Penduduk |
| .31 | Migrasi antar Wilayah |
| .32 | Migrasi International |
| .33 | Urbanisasi |
| .34 | Sementara |
| .35 | Migarsi Non Permanen |
| .4 | Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk |
| .41 | Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk |
| .42 | Pelayanan Kelembagaan Ekonomi |
| .43 | Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya |
| .44 | Partisipasi Masyarakat |
| .5 | Pengembangan Wawasan Kependudukan |
| .51 | Pendidikan Jalur Sekolah |
| .52 | Pendidikan Jalur Luar Sekolah |

| | |
|------------|--|
| .53 | Pendidikan Jalur Masyarakat |
| .54 | Pembangunan Berwawasan Kependudukan |
| 475 | Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan |
| .1 | Indikator Kependudukan |
| .11 | Perumusan Penempatan dan Pengembangan Indikator Kependudukan |
| .12 | Pemanfaatan Indikator Kependudukan |
| .13 | Sosialisasi Indikator Kependudukan |
| .2 | Proyeksi Penduduk |
| .21 | Penyusun dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan |
| .22 | Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan |
| .3 | Analisis Dampak Kependudukan |
| .31 | Penyusunan dan Pengembangan Analisis Dampak Kependudukan |
| .32 | Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan |
| .4 | Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah |
| .41 | Lembaga International |
| .42 | Lembaga Masyarakat dan Nirlaba |
| .43 | Lembaga Usaha Swasta |
| .5 | Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah |
| .51 | Lembaga Pemerintah |
| .52 | Pemerintah Provinsi |
| .53 | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| .6 | Analisis |
| 476 | Monitoring |
| 477 | Evaluasi |
| 478 | Dokumentasi |
| 479 | - |
| 480 | MEDIA MASSA |
| 481 | Penerbitan |
| .1 | Surat Kabar |
| .2 | Majalah |
| .3 | Buku |
| .4 | Penerjemahan |
| 482 | Radio |
| .1 | RRI |
| .11 | Siaran Pedesaan, jangan diklasifikasikan di sini. Lihat : 411.54 |
| .2 | Non RRI |
| .3 | Luar Negeri |
| 483 | Televisi |
| 484 | Film |
| 485 | Pers |
| .1 | Kewartawanan |
| .11 | Wawancara |
| .12 | Informasi Nasional |
| 486 | Grafika |
| 487 | Penerangan |
| .1 | Pameran Non Komersial |
| 488 | Operation Room |
| 489 | Hubungan Masyarakat |
| 490 | - |
| 491 | - |
| 492 | - |
| 493 | - |
| 494 | - |
| 495 | - |
| 496 | - |

497 -
498 -
499 -

500 PEREKONOMIAN

500 PEREKONOMIAN

.1 Dewan Stabilisasi
501 Pengadaan Pangan
502 Pengadaan Sandang
503 Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan suatu bidang, klasifikasikan pada masalahnya.
504 -
505 -
506 -
507 -
508 -
509 -

510 PERDAGANGAN

Klasifikasikan di sini : Tataniaga
.1 Promosi Perdagangan
.11 Pekan Raya
.12 Iklan
.13 Pameran, Pameran non komersial Lihat 487.1
.2 Pelelangan
.3 Tera
511 Pemasaran
.1 Sembilan bahan pokok, Minyak Tanah, Minyak Goreng, Sabun, dan Sebagainya.
.2 Pasar
.3 Pertokoan, kaki lima, kios
512 Ekspor
513 Impor
514 Perdagangan antar pulau
515 Perdagangan Luar Negeri
516 Perundangan, termasuk tangki penyimpanan minyak goreng
517 Aneka Usaha Perdagangan
518 Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil, Mikro (UMKM)
.1 Kelembagaan
.11 Pendirian Badan Hukum Koperasi
.12 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
.13 Amalgamasi / Pembubaran Koperasi
.14 Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
.15 Peningkatan Kelembagaan Koperasi
.16 Penetapan Peningkatan Koperasi
.2 Usaha Koperasi
.21 Usaha Koperasi Pertanian
.22 Usaha Koperasi Kehutanan
.23 Usaha Koperasi Perkebunan
.24 Usaha Koperasi Perikanan
.25 Usaha Koperasi Peternakan
.26 Usaha Koperasi Perdagangan
.27 Usaha Koperasi Perindustrian
.28 Usaha Koperasi Pertambangan
.3 Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam
.31 Pembiayaan Usaha Simpan Pinjam (USP)
.32 Pembiayaan Pola Konvensional

| | |
|-----|--|
| .33 | Pembiayaan Pola Syariah |
| .34 | Rekomendasi dan Dana Bergulir |
| .35 | Penagihan Dana Bergulir |
| .36 | Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam |
| .37 | Sertifikasi Tanah bagi PMK |
| .38 | Kasus KSP / USP / Koperasi |
| .4 | Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) |
| .41 | Kerjasama UMKM |
| .42 | Informasi Bisnis |
| .43 | Pemasaran Usaha |
| .44 | Pemberdayaan UMKM |
| .45 | Perlindungan dan Iklim Usaha |
| .46 | Kemitraan dan Jaringan Usaha |
| .47 | Sosialisasi UMKM |
| .48 | Klinik UMKM |
| .5 | UPT Diklat Koperasi dan UMKM |
| .51 | Diklat Perkoperasian untuk Gerakan Koperasi |
| .52 | Diklat UMKM |
| 519 | - |

520

PERTANIAN

| | |
|-----|---|
| 521 | Tanaman Pangan |
| .1 | Program |
| .11 | Bimas/Inmas termasuk kredit |
| .12 | - |
| .2 | Produksi |
| .21 | Padi/Panen |
| .22 | Palawija |
| .23 | Jagung |
| .24 | Ketela Pohon/Ubi-ubian |
| .25 | Hortikultura |
| .26 | Sayuran/Buah-buahan |
| .27 | Tanaman Hias |
| .28 | Pembudidayaan Rumput Laut |
| .3 | Saran usaha pertanian |
| .31 | Peralatan, meliputi traktor dan sebagainya |
| .32 | Pembibitan |
| .33 | Pupuk |
| .34 | Sertifikasi Benih |
| .4 | Perlindungan tanaman |
| .41 | Penyakit, Penyakit Dalam, Penyakit Batang |
| .42 | Hama Serangga : Wereng, Walang Sangit, Tungro, Hama Tikus dan sejenisnya |
| .43 | Pemberantasan Hama, meliputi : Penyemprotan, Penyiangan, Geropyokan, Sprayer, Pemberantasan Melalui Udara |
| .44 | Pestisida |
| .5 | Tanah Pertanian Pangan |
| .51 | Persawahan |
| .52 | Perladangan |
| .53 | Kebun |
| .54 | Rumpon Ikan Laut |
| .55 | KTA/Lahan Kritis |
| .6 | Pengusaha Pertanian |
| .7 | Bina Usaha |
| .71 | Pasca Panen |
| .72 | Pemasaran Hasil |
| 522 | Kehutanan |
| .1 | Program |
| .11 | Hak pengusaha hutan |

| | |
|------|---|
| .12 | Tata guna Tanah |
| .13 | Perpetaan Hutan |
| .14 | Tumpangsari |
| .2 | Produksi |
| .21 | Kayu |
| .22 | Non Kayu |
| .3 | Sarana usaha kehutanan |
| .4 | Penghijauan |
| .5 | Kelestarian |
| .51 | Cagar alam, margasatwa, suaka margasatwa |
| .52 | Berburu, meliputi larangan dan ijin berburu |
| .53 | Kebun Binatang |
| .54 | Konservasi Lahan |
| .6 | Penyakit/Hama |
| .7 | Jenis-jenis Hutan |
| .71 | Hutan Hidup |
| .72 | Hutan Wisata |
| .73 | Hutan Produksi |
| .74 | Hutan Lindung |
| 523 | Perikanan |
| .1 | Program |
| .11 | Penyuluh |
| .12 | Teknologi |
| .2 | Produksi |
| .21 | Pelelangan |
| .3 | Usaha Perikanan |
| .31 | Pembibitan |
| .32 | Daerah Penangkapan |
| .33 | Pertambakan, meliputi: Tambak Ikan Deras, Tambak Udang, dan lain-lain |
| .34 | Jaring Apung |
| .4 | Sarana |
| .41 | Peralatan |
| .42 | Kapal |
| .43 | Pelabuhan |
| .5 | Pengusaha, Nelayan |
| 524 | Peternakan |
| .1 | Produksi |
| .11 | Susu ternak rakyat |
| .12 | Telur |
| .13 | Daging |
| .14 | Kulit |
| .2 | Sarana usaha ternak |
| .21 | Pembibitan |
| .22 | Kandang Ternak |
| .3 | Kesehatan hewan |
| .31 | Penyakit Hewan |
| .32 | Pos Kesehatan Hewan |
| .33 | <i>Tesi Pullorum</i> |
| .34 | Karantina |
| .35 | Pemberantasan Penyakit Hewan termasuk upaya pencegahannya |
| .4 | Perunggasan |
| .5 | Pengembangan Ternak |
| .51 | Inseminasi Buatan |
| .52 | Pembibitan/Bibit Unggul |
| .53 | Penyebaran Ternak |
| .6 | Makanan Ternak |
| .7 | Tempat pemotongan hewan |
| .8 | Data Peternakan |
| 525. | Perkebunan |

| | |
|-----|-------------------------------|
| .1 | Program |
| .2 | Produksi |
| .21 | Karet |
| .22 | Teh |
| .23 | Tembakau |
| .24 | Tebu |
| .25 | Cengkeh |
| .26 | Kopra |
| .27 | Kopi |
| .28 | Coklat |
| .29 | Aneka tanaman |
| .3 | Sarana Prasarana Perkebunan |
| .31 | Sarana Prasarana Produksi |
| .4 | Proteksi Tanaman Perkebunan |
| .41 | Konversi |
| .42 | Pengendalian OPT |
| .43 | Gangguan Usaha |
| .5 | Usaha Tani Perkebunan |
| .51 | Bimbingan Usaha dan Prasarana |
| .52 | Pengolahan Hasil |
| .53 | Kelembagaan |
| 6. | Pembenihan |
| 526 | - |
| 527 | - |
| 528 | - |
| 529 | - |

| | |
|------------|---------------------------|
| 530 | PERINDUSTRIAN |
| .08 | Undang-undang Gangguan |
| 531 | Industri Logam |
| 532 | Industri Mesin/Elektronik |
| 533 | Industri Kimia/farmasi |
| 534 | Industri Tekstil |
| 535 | Industri makanan/minuman |
| 536 | Aneka Industri/Perusahaan |
| 537 | Aneka kerajinan |
| 538 | Usaha Negara/BUMN |
| .1 | Perjan |
| .2 | Perum |
| .3 | Persero/PT, CV |
| 539 | Perusahaan Daerah/BUMD |

| | |
|------------|----------------------------------|
| 540 | PERTAMBANGAN/KESAMUDERAAN |
| 541 | Minyak Bumi |
| .1 | Eksplorasi |
| .2 | Eksplorasi |
| 542 | Gas Bumi |
| .1 | Eksplorasi/Pengeboran |
| .11 | Kontrak Kerja |
| .2 | Pengolahan Tangki, Pompa, Tanker |
| 543 | Pertambangan Umum |
| .1 | Logam |
| .2 | Non Logam |
| .3 | Radioaktif |
| .4 | Batu bara |
| 544 | Panas Bumi |
| 545 | Aneka Tambang |
| 546 | Geologi |

- .1 Vulkanologi
- .11 Pengawasan gunung berapi
- .2 Sumur artesis, Air Bawah Tanah
- 547 Laboratorium Sumber Daya Manusia (SDM)
 - .1 Jasa Analisa
 - .2 Jasa Teknik Pertambangan
- 548 Kesamuderaan
- 549 Pesisir Pantai

- 550 PERHUBUNGAN**
- 551 Perhubungan Darat
 - .1 Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, dan Danau
 - .11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
 - .2 Angkutan Jalan Raya
 - .21 Perizinan
 - .22 Terminal
 - .23 Alat angkutan
 - .24 Pengujian Kendaraan Bermotor
 - .25 Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor
 - .26 Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor
 - .27 Rekomendasi
 - .3 Angkutan Sungai
 - .31 Perizinan
 - .32 Terminal
 - .33 Pelabuhan
 - .4 Angkutan Danau
 - .41 Perizinan
 - .42 Terminal
 - .43 Pelabuhan
 - .5 *Feri*
 - .51 Perizinan
 - .52 Terminal
 - .53 Pelabuhan
 - .6 Perkerata apian
- 552 Perhubungan Laut
 - .1 Lalu Lintas Angkutan Laut, Pelayanan Umum
 - .11 Keamanan lalu lintas, rambu-rambu
 - .12 Pelayanan Dalam Negeri
 - .13 Pelayanan Luar Negeri
 - .2 Perkapalan Alat Angkutan
 - .3 Pelabuhan
 - .4 Pengerukan
 - .5 Penjagaan pantai
- 553 Perhubungan Udara
 - .1 Lalu Lintas Udara/Keamanan Lalu Lintas Udara
 - .2 Pelabuhan Udara / Bandara
 - .3 Alat Angkutan
- 554 Pos
- 555 Telekomunikasi
 - .1 Telepon
 - .2 Telegram
 - .3 *Telex/SSB*
 - .4 Satelit
 - .5 Stasiun Bumi
- 556 Pariwisata
 - .1 Obyek Daya Tarik Wisata
 - .2 Sarana Pariwisata
 - .3 Jasa Pariwisata
 - .4 Pemasaran
 - .5 Sumber Daya Pariwisata dan Peran serta masyarakat

| | |
|------|---------------|
| 557. | Meteorologi |
| .1 | Ramalan Cuaca |
| .2 | Curah Hujan |
| .3 | Kemarau |
| 558 | - |
| 559 | - |

560 TENAGA KERJA

| | |
|-----|------------------------------|
| .1 | Pengangguran |
| 561 | Upah |
| 562 | Penempatan tenaga kerja, TKI |
| 563 | Latihan kerja |
| 564 | Tenaga sukarela |
| .1 | Butsi |
| .2 | Padat karya |
| 565 | Perselisihan perburuhan |
| 566 | Keselamatan kerja |
| 567 | Pemutusan hubungan kerja |
| 568 | Kesejahteraan buruh |
| 569 | Tenaga orang asing |

570 PERMODALAN

| | |
|-----|--|
| 571 | Modal domestik |
| 572 | Modal asing |
| 573 | Modal patungan (<i>joint venture</i>) penyertaan modal |
| 574 | Pasar uang dan modal |
| 575 | Saham |
| 576 | - |
| 577 | - |
| 578 | - |
| 579 | - |

580 PERBANKAN/MONETER

| | |
|-----|---|
| 581 | Kredit |
| 582 | Investasi |
| 583 | Deposito |
| 584 | Bank Pembangunan Daerah |
| 585 | Asuransi Dana Kecelakaan Lalu Lintas |
| 586 | Alat pembayaran, cek, giro, wesel, transfer |
| 587 | Fiskal |
| 588 | Hutang Negara |
| 589 | Moneter |

590 AGRARIA

| | |
|------|---|
| 591. | Tata guna tanah |
| .1 | Pemetaan dan pengukuran |
| .2 | Perpetaan |
| .3 | Penyediaan data |
| .4 | Fatwa tata guna tanah |
| .5 | Tanah kritis |
| 592 | <i>Landreform</i> |
| .1 | Redistribusi |
| .11 | Pendaftaran pemilikan dan pengurusan |
| .12 | Penentuan tanah obyek <i>landreform</i> |
| .13 | Pembagian tanah obyek <i>landreform</i> |
| .14 | Sengketa redistribusi tanah obyek <i>landreform</i> |
| .2 | Ganti rugi |
| .21 | Ganti rugi tanah kelebihan meliputi: Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan |

- .22 Ganti rugi tanah absentee
meliputi: Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
- .23 Ganti rugi tanah partikelir
meliputi: Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
- .3 Bagi hasil
- .31 Penetapan imbalan bagi hasil
- .32 Pelaksanaan perjanjian bagi hasil
- .33 Sengketa perjanjian bagi hasil
- .4 Gadai tanah
- .41 Pendaftaran pelaksanaan gadai tanah
- .42 Pelaksanaan gadai tanah
- .43 Sengketa gadai tanah
- .5 Bimbingan dan penyuluhan
- .6 Pengembangan
- .7 Yayasan dana *landreform* (YDL)
- 593 Pengurusan hak-hak tanah
- .01 Penyusunan program bimbingan teknis
- .1 Sewa tanah
- .11 Sewa tanah untuk tanaman tertentu, tebu, tembakau, rosela,
corchorus
- .2 Hak milik
- .21 Perorangan
- .22 Badan hukum
- .3 Hak pakai
- .31 Perorangan
- .311 Warga Negara Indonesia
- .312 Warga Negara Asing
- .32 Badan hukum
- .321 Badan Hukum Indonesia
- .322 Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, kantor dagang
asing.
- .33 Tanah gedung-gedung negeri
- .4 Guna usaha
- .41 Perkebunan besar
- .42 Perkebunan rakyat
- .43 Peternakan
- .44 Perikanan
- .45 Kehutanan
- .5 Hak Guna Bangunan
- .51 Perorangan
- .52 Badan Hukum
- .53 P3MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda)
- .54 Badan Hukum Asing Belanda-PRK No. 565
- .55 Pemulihan Hak (Pen, Pres, 4/1960)
- .6 Hak pengelolaan
- .61 PN Perumnas, *Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate*
- .62 Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
- .7 Sengketa tanah
- .71 Peradilan perkara tanah (lihat juga 183)
- .8 Pencabutan dan pembebasan tanah
- .81 Pencabutan hak
- .82 Pembebasan tanah
- .83 Ganti rugi tanah
- 594. Pendaftaran tanah
- .1 Pengukuran/pemetaan
- .11 Fotogrametri
- .12 Terrestrial
- .13 Triangulasi
- .14 Peralatan
- .2 Dana pengukuran (Permen Agraria No.61/1965)

| | |
|------|-----------------------------------|
| .3 | Sertifikat |
| .4 | Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) |
| 595. | Lahan Transmigrasi |
| .1 | Tata guna tanah |
| .2 | Landreform |
| .3 | Pengurusan hak-hak tanah |
| .4 | Pendaftaran tanah |
| 596 | - |
| 597 | - |
| 598 | - |
| 599 | - |

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

| | |
|-----|--|
| 600 | PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN |
| 601 | Tata bangunan konstruksi dan Industri konstruksi. |
| 602 | Kontraktor, pemborong |
| .1 | Tender |
| .2 | Penunjukan |
| .3 | Prakualifikasi |
| .31 | Daftar Rekanan Mampu (DRM) |
| .32 | Tanda Daftar Rekanan (TDR) |
| 603 | Arsitektur |
| 604 | Bahan bangunan |
| .1 | Tanah dan batu, seperti : batu belah, <i>steen slaag</i> , split dan sebagainya |
| .2 | Aspal, aspal buatan, aspal alam (Butas) |
| .3 | Besi dan logam lainnya |
| .31 | Besi beton |
| .32 | Besi profil (konstruksi) |
| .33 | Paku |
| .34 | Aluminium profil |
| .4 | Bahan-bahan pelindung dan pengawet (Cat, <i>Tech</i> , <i>Til</i> , pengawet kayu) |
| .5 | Semen |
| .6 | Kayu (seperti : Balok, papan, dolken, plywood, gabus dsb.) |
| .7 | Bahan penutup atap (genting, asbes gelombang) |
| .8 | Alat-alat penggantung dan pengunci |
| .9 | Bahan-bahan bangunan lainnya. |
| 605 | Instalasi |
| .1 | Instalasi bangunan |
| .2 | Instalasi air |
| .3 | Instalasi sanitasi |
| .4 | Instalasi pengaturan udara |
| .5 | Instalasi akustik |
| .6 | Instalasi cahaya/penerangan |
| 606 | Konstruksi pencegahan |
| .1 | Konstruksi Pencegahan terhadap kebakaran |
| .2 | Konstruksi Pencegahan terhadap gempa |
| .3 | Konstruksi Pencegahan terhadap angin/udara/panas |
| .4 | Konstruksi Pencegahan terhadap kekaduahan |
| .5 | Konstruksi Pencegahan terhadap gas/explosife |
| .6 | Konstruksi Pencegahan terhadap serangga |
| .7 | Konstruksi Pencegahan terhadap radiasi atom |
| 607 | - |
| 608 | - |
| 609 | - |

| | |
|------------|--------------------------------|
| 610 | PENGAIRAN |
| 611. | Irigasi |
| .1 | Bangunan waduk |
| .11 | Bendungan |
| .12 | Tanggul |
| .13 | Pelimpahan banjir |
| .14 | Menara pengambilan |
| .2 | Bangunan pengambilan |
| .21 | Bendung |
| .22 | Bendung dengan pintu bilas |
| .23 | Bendung dengan pompa |
| .24 | Pengambilan bebas |
| .25 | Pengambilan bebas dengan pompa |
| .26 | Sumur dengan pompa |
| .27 | Kantung lumpur |
| .28 | <i>Silt ekstraktor</i> |
| .29 | <i>Escope channel</i> |
| .3 | Bangunan pembawa |
| .31 | Saluran |
| .311 | Saluran induk |
| .312 | Saluran sekunder |
| .313 | Suplesi |
| .314 | Tersier |
| .315 | Saluran kwarter |
| .316 | Saluran pasangan |
| .317 | Saluran tertutup/terowongan |
| .32 | Bangunan |
| .321 | Bangunan bagi |
| .322 | Bangunan bagi dan sadap |
| .323 | Bangunan sadap |
| .324 | Bangunan <i>check</i> |
| .325 | Bangunan terjun |
| .33 | <i>Box tersier</i> |
| .34 | Got miring |
| .35 | Talang |
| .36 | <i>Syphon</i> |
| .37 | Gorong-gorong |
| .38 | Pelimpahan samping |
| .4 | Bangunan pembuang |
| .41 | Saluran |
| .411 | Saluran pembuang induk |
| .412 | Saluran pembuang sekunder |
| .413 | Saluran pembuang tersier |
| .42 | Bangunan |
| .421 | Bangunan outlet |
| .422 | Bangunan terjun |
| .423 | Bangunan penahan banjir |
| .43 | Gorong-gorong pembuang |
| .44 | Talang pembuang |
| .45 | Syphon pembuang |
| .5 | Bangunan lainnya |
| .51 | Jalan |
| .511 | Jalan inspeksi |
| .512 | Jalan logistik |
| .52 | Jembatan |
| .521 | Jembatan inspeksi |
| .522 | Jembatan hewan |
| .53 | Tangga cuci |
| .54 | Kubangan kerbau |

- .55 Waduk lapangan
- .56 Bangunan penunjang
- .57 Jaringan telepon
- .58 Stasiun agro
- 612 *Folder*
 - .1 Tanggul Keliling
 - .11 Tanggul
 - .12 Bangunan penutup sungai
 - .13 Jembatan
 - .2 Bangunan pembawa
 - .21 Saluran
 - .211 Saluran muka induk
 - .213 Saluran pembawa sekunder
 - .22 Stasiun pompa pemasukan
 - .23 Bangunan bagi
 - .24 Gorong-gorong
 - .25 *Syphon*
 - .3 Bangunan pembuang
 - .31 Stasiun pompa pembuang
 - .32 Saluran
 - .321 Saluran pembuangan induk
 - .322 Saluran pembuangan sekunder
 - .33 Pintu air pembuangan
 - .34 Gorong-gorong pembuangan
 - .35 *Syphon* pembuangan
 - .4 Bangunan lainnya
 - .41 Bangunan
 - .411 Bangunan pengukur air
 - .412 Bangunan pengukur curah hujan
 - .413 Bangunan gudang stasiun pompa
 - .414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
 - .42 Rumah petugas eksploitasi
- 613 *Pasang surut*
 - .1 Bangunan Pembawa
 - .11 Saluran
 - .111 Saluran Pembawa Induk
 - .112 Saluran Pembawa Sekunder
 - .113 Saluran Pembawa Tersier
 - .114 Saluran Penyimpanan Air
 - .12 Bangunan Pintu Pemasukan
 - .2 Bangunan pembuang
 - .21 Saluran
 - .211 Saluran pembuang induk
 - .212 Saluran pembuang sekunder
 - .213 Saluran pembuang tersier
 - .214 Saluran pengumpul air
 - .22 Bangunan pintu pembuangan
 - .3 Bangunan lainnya
 - .31 Kolam pasang
 - .32 Saluran
 - .321 Saluran lalu lintas
 - .322 Bangunan pengukur muka air
 - .33 Bangunan
 - .331 Bangunan Penangkis Kotoran
 - .332 Bangunan Pengukur Muka Air
 - .333 Bangunan Pengukur Curah Hujan
 - .34 Jalan
 - .35 Jembatan
- 614 *Pengendalian sungai*
 - .1 Bangunan pengaman

| | |
|------------|---------------------------------------|
| .11 | Tanggul banjir |
| .12 | Pintu pengatur banjir |
| .13 | Klep pengatur banjir |
| .14 | Tembok pengaman talud |
| .15 | Krib |
| .16 | Kantung lumpur |
| .17 | <i>Check-dam</i> |
| .18 | <i>syphon</i> |
| .2 | Saluran pengaman |
| .21 | Saluran banjir |
| .22 | Saluran <i>drainage</i> |
| .23 | <i>Corepure</i> |
| .3 | Bangunan lainnya |
| .31 | <i>Warning system</i> |
| .32 | Stasiun |
| .321 | Stasiun pengukur curah hujan |
| .322 | Stasiun pengukur air |
| .323 | Stasiun pengukur cuaca |
| .324 | Stasiun pos penjagaan |
| 615 | Pengaman pantai |
| .1 | Tanggul |
| .2 | Krib |
| .3 | Bangunan lainnya |
| 616 | Air Tanah |
| .1 | Stasiun pompa |
| .2 | Bangunan pembawa |
| .3 | Bangunan pembuang |
| .4 | Bangunan lainnya |
| 617 | - |
| 618 | - |
| 619 | - |
| 620 | JALAN |
| 621 | Jalan Kota |
| .1 | Daerah penguasaan |
| .11 | Tanah |
| .12 | Tanaman |
| .13 | Bangunan |
| .2 | Bangunan sementara |
| .21 | Jalan sementara |
| .22 | Jembatan sementara |
| .23 | Kantor proyek |
| .24 | Gudang proyek |
| .25 | Barak kerja |
| .26 | Laboratorium lapangan |
| .27 | Rumah |
| .3 | Badan jalan |
| .31 | Pekerjaan tanah (<i>earth work</i>) |
| .32 | Stabilisasi |
| .4 | Perkerasan |
| .41 | Lapis pondasi bawah |
| .42 | Lapis pondasi |
| .43 | Lapis permukaan |
| .5 | <i>Drainage</i> |
| .51 | Parit tanah |
| .52 | Gorong-gorong (<i>culvert</i>) |
| .6 | Buku Trotoir |
| .61 | Tanah |
| .62 | Perkerasan |

| | |
|-----|-------------------------------------|
| .63 | Pasangan |
| .7 | Median |
| .71 | Tanah |
| .72 | Tanaman |
| .73 | Perkerasan |
| .74 | Pasangan |
| .8 | Daerah samping |
| .81 | Tanaman |
| .82 | Pagar |
| .9 | Bangunan pelengkap dan pengaman |
| .91 | Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas |
| .92 | Lampu penerangan |
| .93 | Lampu pengatur lalu lintas |
| .94 | Patok-patok KM |
| .95 | Patok-patok ROW (sempadan) |
| .96 | Rel pengaman |
| .97 | Pagar |
| .98 | Turap penahan |
| .99 | Bronjong |
| 622 | Jalan luar kota |
| .1 | Daerah penguasaan |
| .11 | Tanah |
| .12 | Tanaman |
| .13 | Bangunan |
| .2 | Bangunan sementara |
| .21 | Jalan sementara |
| .22 | Jembatan sementara |
| .23 | Kantor proyek |
| .24 | Gudang proyek |
| .25 | Barak kerja |
| .26 | Laboratorium lapangan |
| .27 | Rumah |
| .3 | Badan jalan |
| .31 | Pekerjaan tanah (earth work) |
| .32 | Stabilisasi |
| .4 | Perkerasan (<i>pavement</i>) |
| .41 | Lapis pondasi bawah |
| .42 | Lapis pondasi |
| .43 | Lapis permukaan |
| .5 | <i>Drainage</i> |
| .51 | Parit |
| .52 | Gorong-gorong (<i>Culvert</i>) |
| .53 | Sub <i>Drainage</i> |
| .6 | Trotoir |
| .61 | Tanah |
| .62 | Perkerasan |
| .7 | Median |
| .71 | Tanah |
| .72 | Tanaman |
| .73 | Perkerasan |
| .74 | Pasangan |
| .8 | Daerah samping |
| .81 | Tanaman |
| .82 | Pagar |
| .9 | Bangunan pelengkap dan pengaman |
| .91 | Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas |
| .92 | Lampu penerangan |
| .93 | Lampu pengatur lalu lintas |
| .94 | Patok-patok KM |
| .95 | Patok-patok ROW (Sempadan) |

| | |
|------------|---------------------------------------|
| .96 | Rel-rel pengaman |
| .97 | Pagar |
| .98 | Turap pengaman |
| .99 | Bronjong |
| 623 | - |
| 624 | - |
| 625 | - |
| 626 | - |
| 627 | - |
| 628 | - |
| 629 | - |
| 630 | JEMBATAN |
| 631 | Jembatan pada jalan kota |
| .1 | Daerah penguasaan |
| .11 | Tanah |
| .12 | Tanaman |
| .13 | Bangunan |
| .2 | Bangunan sementara |
| .21 | Jalan sementara |
| .22 | Jembatan sementara |
| .23 | Kantor proyek |
| .24 | Gudang proyek |
| .25 | Barak kerja |
| .26 | Laboratorium lapangan |
| .27 | Rumah |
| .3 | Pekerjaan tanah (<i>earth work</i>) |
| .31 | Galian tanah |
| .32 | Timbunan tanah |
| .4 | Pondasi |
| .41 | Pondasi kepala jembatan |
| .42 | Pondasi pilar |
| .43 | Pondasi angker |
| .5 | Bangunan bawah |
| .51 | Kepala jembatan |
| .52 | Pilar |
| .53 | <i>Piloon</i> |
| .54 | Landasan |
| .6 | Bangunan |
| .61 | Gelagar |
| .62 | Lantai |
| .63 | Perkerasan |
| .64 | Jalan orang/trotoir |
| .65 | Sandaran |
| .66 | Talang air |
| .7 | Bangunan pengaman |
| .71 | Turap/penahan |
| .72 | Bronjong |
| .73 | Strek dam |
| .74 | Kist dam |
| .75 | <i>Courpure</i> |
| .76 | Krib |
| .8 | Bangunan pelengkap |
| .81 | Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas |
| .82 | Lampu penerangan |
| .83 | Lampu pengatur lalu lintas |
| .84 | Patok pengaman |
| .85 | Patok ROW (sempadan) |
| .86 | Pagar |

| | |
|-----|-------------------------------------|
| .9 | Oprit |
| .91 | Badan |
| .92 | Perkerasan |
| .93 | <i>Drainage</i> |
| .94 | Baku |
| .95 | Median |
| 632 | Jembatan pada jalan luar kota |
| .1 | Daerah penguasaan |
| .11 | Tanah |
| .12 | Tanaman |
| .13 | Bangunan |
| .2 | Bangunan sementara |
| .21 | Jalan sementara |
| .22 | Jembatan sementara |
| .23 | Kantor proyek |
| .24 | Gudang proyek |
| .25 | Barak kerja |
| .26 | Laboratorium lapangan |
| .27 | Rumah |
| .3 | Pekerjaan tanah |
| .31 | Galian tanah |
| .32 | Timbunan tanah |
| .4 | Pondasi |
| .41 | Pondasi kepala jembatan |
| .42 | Pondasi pilar |
| .43 | Pondasi angker |
| .5 | Bangunan bawah |
| .51 | Kepala jembatan |
| .52 | Pilar |
| .53 | <i>piloon</i> |
| .54 | Landasan |
| .6 | Bangunan atas |
| .61 | Gelagar |
| .62 | Lantai |
| .63 | Perkerasan |
| .64 | Jalan orang/trotoar |
| .65 | Sandaran |
| .66 | Talang air |
| .7 | Bangunan pengaman |
| .71 | Turap/penahan |
| .72 | Bronjong |
| .73 | Strek dam |
| .74 | Kist dam |
| .75 | <i>Courpure</i> |
| .76 | Krib |
| .8 | Bangunan pelengkap |
| .81 | Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas |
| .82 | Lampu penerangan |
| .83 | Lampu pengatur lalu lintas |
| .84 | Patok pengaman |
| .85 | Patok ROW (sempadan) |
| .86 | Pagar |
| .9 | Oprit |
| .91 | Badan |
| .92 | Perkerasan |
| .93 | <i>Drainage</i> |
| .94 | Baku |
| .95 | Median |
| 633 | - |
| 634 | - |

| | |
|------------|-------------------------------|
| 635 | - |
| 636 | - |
| 637 | - |
| 638 | - |
| 639 | - |
| 640 | BANGUNAN |
| 641 | Bangunan Pemerintah |
| .1 | Gedung pengadilan |
| .2 | Rumah pejabat negara |
| .3 | Gedung DPR |
| .4 | Gedung Balai Kota |
| .5 | Penjara |
| .6 | Perkantoran |
| 642 | Bangunan Pendidikan |
| .1 | Taman Kanak-kanak |
| .2 | SD dan Sekolah Menengah |
| .3 | Perguruan Tinggi |
| 643 | Bangunan Rekreasi |
| .1 | Bangunan Olah Raga |
| .2 | Gedung Kesenian |
| .3 | Gedung Pemancar |
| 644 | Bangunan Perdagangan |
| .1 | Pusat Perbelanjaan |
| .2 | Gedung Perdagangan |
| .3 | Bank |
| .4 | Perkantoran |
| 645 | Bangunan Pelayanan Umum |
| .1 | Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum |
| .2 | Gedung Parkir |
| .3 | Rumah Sakit |
| .4 | Gedung Telkom |
| .5 | Terminal Angkutan Udara |
| .6 | Terminal Angkutan Air |
| .7 | Terminal Angkutan Darat |
| .8 | Bangunan Keagamaan |
| 646 | Bangunan Peninggalan Sejarah |
| .1 | Monumen |
| .2 | Candi |
| .3 | Keraton |
| .4 | Rumah Tradisionil |
| 647 | Bangunan Industri |
| 648 | Bangunan Tempat Tinggal |
| .1 | Rumah Perkotaan |
| .11 | Inti/Sederhana |
| .12 | Sedang/Mewah |
| .2 | Rumah Pedesaan |
| .21 | Rumah Contoh |
| .3 | Real Estate |
| .4 | Bapertarum |
| 649 | Elemen Bangunan |
| .1 | Pondasi |
| .11 | Di atas tiang |
| .2 | Dinding |
| .21 | Penahan beban |
| .22 | Tidak menahan beban |
| .3 | Atap |
| .4 | Lantait/langit-langit |
| .41 | <i>Suspended</i> |

| | |
|------------|--|
| .42 | Solit |
| .5 | Pintu/Jendela |
| .51 | Pintu harmonika |
| .52 | Pintu biasa |
| .53 | Pintu sorong |
| .54 | Pintu kayu |
| .55 | Jendela sorong |
| .56 | Jendela vertikal |
| 650 | TATA KOTA |
| 651 | Daerah Perdagangan /Pelabuhan |
| .1 | Daerah Pusat Perbelanjaan |
| .2 | Daerah Perkotaan |
| 652 | Daerah Pemerintah |
| 653 | Daerah Perumahan (<i>Site & service</i>) |
| .1 | Kepadatan Rendah (<i>Low Density</i>) |
| .2 | Kepadatan Tinggi (<i>High Density</i>) |
| 654 | Daerah Industri |
| .1 | Industri Berat |
| .2 | Industri Ringan |
| .3 | Industri Rumah (<i>Home Industri</i>) |
| 655 | Daerah Rekreasi (<i>Open Space</i>) |
| .1 | <i>Public Gardens</i> |
| .2 | <i>Sport and Playing Fields</i> |
| .3 | <i>Open Space</i> |
| 656 | Transportasi (Tata Letak) |
| .1 | Jaringan jalan |
| .11 | Penerangan jalan |
| .2 | Jaringan kereta api |
| .3 | Jaringan sungai |
| 657 | Assaineering |
| .1 | Saluran pengumpulan |
| .2 | Instalasi pengolahan |
| .21 | Bangunan |
| .211 | Bangunan penyaringan |
| .212 | Bangunan penghancur kotoran/sampah |
| .213 | Bangunan pengendap |
| .214 | Bangunan pengering lumpur |
| .22 | Unit disinfektan |
| .23 | Unit perpompaan |
| 658 | Kesehatan lingkungan |
| .1 | Persampahan |
| .11 | Bangunan pengumpul |
| .12 | Bangunan pemusnahan |
| .2 | Pengotoran udara |
| .3 | Pengotoran air |
| .31 | Air buangan industri |
| .4 | Kegaduhan |
| .5 | Kebersihan kota |
| 659 | - |
| 660 | TATA LINGKUNGAN |
| .1 | Lingkungan Hidup |
| .2 | Kebersihan lingkungan |
| .3 | Pencemaran |
| .31 | Pencemaran air |
| .32 | Pencemaran udara |
| 661 | Daerah hutan |

| | |
|-----|---------------------|
| 662 | Daerah pertanian |
| 663 | Daerah pemukiman |
| 664 | Pusat pertumbuhan |
| 665 | Transportasi |
| .1 | Jaringan jalan |
| .2 | Jaringan kereta api |
| .3 | Jaringan sungai |
| 666 | - |
| 667 | - |
| 668 | - |
| 669 | - |

670 KETENAGAAN

| | |
|-----|--|
| 671 | Listrik |
| .1 | Kelistrikan |
| .11 | Kelistrikan PLN |
| .12 | Kelistrikan non PLN |
| .2 | Pembangkit Tenaga Listrik |
| .21 | PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) |
| .22 | PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) |
| .23 | PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) |
| .24 | PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari) |
| .25 | PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) |
| .26 | PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) |
| .27 | PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) |
| .3 | Transmisi Tenaga Listrik |
| .31 | Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo |
| .32 | Saluran Udara Tegangan Tinggi |
| .33 | Kabel bawah tanah |
| .4 | Distribusi Tenaga Listrik |
| .41 | Gardu distribusi |
| .42 | Tegangan rendah |
| .43 | Tegangan menengah |
| .44 | Jaringan bawah tanah |
| .5 | Pengusahaan listrik |
| .51 | Sambungan listrik |
| .52 | Penjualan Tenaga Listrik |
| .53 | Tarif Listrik |
| 672 | Tenaga Air |
| 673 | Tenaga Minyak |
| .1 | Bensin / Premium / Pertamina |
| .2 | Minyak Tanah |
| .3 | Solar |
| 674 | Tenaga Gas |
| .1 | Biofuel |
| .2 | Minyak Tanah |
| .3 | Biogas |
| 675 | Tenaga Matahari |
| 676 | Tenaga Nuklir |
| 677 | Tenaga Panas Bumi |
| 678 | Tenaga Uap |
| 679 | Tenaga lainnya |

680 PERALATAN

| | |
|-----|---|
| 681 | - |
| 682 | - |
| 683 | - |
| 684 | - |

685 -
686 -
687 -
688 -
689 -

690 AIR MINUM

691 *Intake*
.1 Broncaptering
.2 Sumur
.3 Bendungan
.4 Saringan (*screen*)
.5 Pintu Air
.6 Saluran Pembawa
.7 Alat Ukur
.8 Perpompaan
692 Transmisi Air Baku
.1 Perpipaan
.2 Katup Udara (*air relief*)
.3 Katup Pengurus (*blow off*)
.4 Bak Pelepas Tekanan
.5 Jembatan Pipa
.6 *Syphon*
693 Instalasi Pengelolaan
.1 Bangunan Ukur
.2 Bangunan Aerasi
.3 Bangunan Pengendapan
.4 Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
.5 Bangunan Pengaduk
.6 Bangunan Saringan
.7 Perpompaan
.8 *Clear Hell*
694 Distribusi
.1 *Reservoir* menara bawah tanah
.11 Menara
.12 *Reservoir* di bawah tanah
.2 Perpipaan
.3 Perpompaan
.4 Jembatan Pipa
.5 *Syphon*
.6 *Hydran*
.61 *Hydran* Umum
.62 *Hydran* Kebakaran
.7 Katup
.71 Katup Udara (*air relief*)
.72 Katup Pelepas (*blow off*)
.8 Bak pelepas tekanan (*pressure reducing valve*)
695 -
696 -
697 -
698 -
699 -

700 PENGAWASAN

700 PENGAWASAN

701 Bidang Urusan Dalam
702 Bidang Peralatan
703 Bidang Kekayaan Daerah

| | |
|-----|--|
| 704 | Bidang Perpustakaan/ Dokumentasi/ Kearsipan/ Sandi |
| 705 | Bidang Perencanaan |
| 706 | Bidang Organisasi/Ketatalaksanaan |
| 707 | Bidang Penelitian |
| 708 | Bidang Konferensi |
| 709 | Bidang Perjalanan Dinas |

710 **BIDANG PEMERINTAHAN**

| | |
|-----|------------------------------------|
| 711 | Bidang Pemerintahan Pusat |
| 712 | Bidang Pemerintahan Provinsi |
| 713 | Bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota |
| 714 | Bidang Pemerintahan Desa |
| 715 | Bidang MPR/DPR |
| 716 | Bidang DPRD Provinsi |
| 717 | Bidang DPRD Kabupaten/Kota |
| 718 | Bidang Hukum |
| 719 | Bidang Hubungan Luar Negeri |

720 **BIDANG POLITIK**

| | |
|-----|--|
| 721 | Bidang Kepartaian |
| 722 | Bidang Organisasi Kemasyarakatan |
| 723 | Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional |
| 724 | Bidang Organisasi Pemuda |
| 725 | Bidang Organisasi Buruh, Tani, dan Nelayan |
| 726 | Bidang Organisasi Wanita |
| 727 | Bidang Pemilihan Umum |
| 728 | - |
| 729 | - |

730 **BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN**

| | |
|-----|--------------------------------|
| 731 | Bidang Pertahanan |
| 732 | Bidang Kemiliteran |
| 733 | Bidang Perlindungan Masyarakat |
| 734 | Bidang Keamanan |
| 735 | Bidang Kajahatan |
| 736 | Bidang Bencana |
| 737 | Bidang Kecelakaan |
| 738 | - |
| 739 | - |

740 **BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

| | |
|-----|-------------------------|
| 741 | Bidang Pembangunan Desa |
| 742 | Bidang Pendidikan |
| 743 | Bidang Kebudayaan |
| 744 | Bidang Kesehatan |
| 745 | Bidang Agama |
| 746 | Bidang Sosial |
| 747 | Bidang Kependudukan |
| 748 | Bidang Media Masa |
| 749 | - |

750 **BIDANG PEREKONOMIAN**

| | |
|-----|---------------------------------|
| 751 | Bidang Perdagangan |
| 752 | Bidang Pertanian |
| 753 | Bidang Perindustrian |
| 754 | Bidang Pertambangan/Kesamudraan |
| 755 | Bidang Perhubungan |
| 756 | Bidang Tenaga Kerja |
| 757 | Bidang Permodalan |
| 758 | Bidang Perbankan/Moneter |

759 Bidang Agraria

760 BIDANG PEKERJAAN UMUM

761 Bidang Pengairan

762 Bidang Jalan

763 Bidang Jembatan

764 Bidang Bangunan

765 Bidang Tata Kota

766 Bidang Lingkungan

767 Bidang Ketenagaan

768 Bidang Peralatan

769 Bidang Air Minum

770 -

771 -

772 -

773 -

774 -

775 -

776 -

777 -

778 -

779 -

780 BIDANG KEPEGAWAIAN

781 Bidang Pengadaan Pegawai

782 Bidang Mutasi Pegawai

783 Bidang Kependudukan Pegawai

784 Bidang Kesejahteraan Pegawai

785 Bidang Cuti

786 Bidang Penilaian

787 Bidang Tata Usaha Kepegawaian

788 Bidang Pemberhentian Pegawai

789 Bidang Kependidikan Pegawai

790 BIDANG KEUANGAN

791 Bidang Anggaran

792 Bidang Otorisasi

793 Bidang Verifikasi

794 Bidang Pembukuan

795 Bidang Perbendaharaan

796 Bidang Pembinaan Kebendaharaan

797 Bidang Pendapatan

798 -

799 Bidang Bendaharaan

800 KEPEGAWAIAN

800 KEPEGAWAIAN

Klasifikasi di sini: Kebijakanaksanaan Kepegawaian

.1 Perencanaan

.2 Penelitian

.043 Pengaduan

.05 Tim

.07 Statistik

.08 Peraturan Perundang-Undangan

801 -

802 -

803 -

804 -

805 -
806 -
807 -
808 -
809 -

810 **PENGADAAN**

Meliputi: lamaran, pengujian kesehatan, dan pengangkatan calon pegawai.

- 811 Lamaran
 - .1 *Testing*
 - .2 *Screening*
 - .3 Panggilan
- 812 Pengujian Kesehatan
- 813 Pengangkatan Calon Pegawai
 - .1 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan I
 - .2 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II
 - .3 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
 - .4 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV
 - .5 Pengangkatan Calon Guru INPRES
- 814 Pengangkatan Tenaga Lepas
 - .1 Pengangkatan Tenaga Bulanan/Tenaga Kontrak
 - .2 Pengangkatan Tenaga Harian
 - .3 Pengangkatan Tenaga Pensiunan
- 815 -
- 816 -
- 817 -
- 818 -
- 819 -

820 **MUTASI**

Meliputi: pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pemindahan, pelimpahan detasering, tugas belajar, dan wajib militer.

- 821 Pengangkatan
 - .1 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri (Tetap)
 - .11 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan I
 - .12 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan II
 - .13 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan III
 - .14 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan IV
 - .15 Pengangkatan Kembali pegawai Negeri Sipil yang Cuti di Luar Tanggungan Negara
 - .2 Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan.
 - .21 Sekjen/Dirjen/Irjen/Kabag
 - .22 Kepala Biro/Direktur/Isnpektur/Kepala Pusat/Sekretaris/Kepala Dinas/Asisten Sekda
 - .23 Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu
 - .24 Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Pemeriksa
 - .25 Residen/Pembantu Gubernur
 - .26 Wedana/Pembantu Bupati
 - .27 Camat
 - .28 Lurah Administratip (Lurah Desa Lihat 141)
 - .29 Jabatan lainnya
- 822 Kenaikan gaji berkala
 - .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III

- .4 Pegawai Golongan IV
- 823 Kenaikan pangkat/pengangkatan
 - .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
- 824 Pemindahan/pelimpahan/perbantuan
 - .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
- 825 Detasering dan penempatan kembali
- 826 Penunjukan Tugas Belajar
 - .1 Dalam Negeri
 - .2 Luar Negeri
 - .3 Tunjangan Belajar
 - .4 Penempatan kembali
- 827 Wajib Militer
- 828 Mutasi Pegawai Instansi lain
- 829 -

830

KEDUDUKAN

Meliputi: Penghitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat/Gaji, Penghargaan Ijasah, dan Jenjang Pangkat

- 831 Penghitungan Masa Kerja
- 832 Penyesuaian Pangkat/Gaji
 - .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
- 833 Penghargaan Ijasah/Penyesuaian
- 834 Jenjang Pengkat/Eselonering
- 835 -
- 836 -
- 837 -

840

KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Meliputi: Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan Koperasi/ Distribusi, Perumahan, Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi, dan Dispensasi

- 841 Tunjangan
 - .1 Jabatan
 - .2 Kehormatan
 - .3 Kematian
 - .4 Tunjangan Hari Raya
 - .5 Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah
 - .6 Keluarga
 - .7 Pangan, Uang Makan
- 842 Dana
 - .1 Taspen
 - .2 Kesehatan
 - .3 Asuransi
- 843 Perawatan Kesehatan
 - .1 Poliklinik
 - .2 Perawatan dokter
 - .3 Obat-obatan
 - .4 Keluarga Berencana
- 844 Koperasi/Distribusi
 - .1 Distribusi Pangan
 - .2 Distribusi Sandang

- .3 Distribusi lainnya
- 845 Perumahan/Tanah
 - .1 Perumahan Pegawai
 - .2 Tanah Kapling
 - .3 Losmen/Hotel
- 846 Bantuan Sosial
 - .1 Bantuan Kebakaran
 - .2 Bantuan Kebanjiran
- 847 Rekreasi
- 848 Dispensasi
- 849 -

850 CUTI

Meliputi: Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti, Cuti Di Luar Tanggungan Negara, dan Cuti Alasan Lain.

- 851 Cuti Tahunan
- 852 Cuti Besar
- 853 Cuti Sakit
- 854 Cuti Hamil
- 855 Cuti Ibadah Haji
- 856 Cuti di Luar Tanggungan Negara
- 857 Cuti Alasan Lain, Cuti Alasan Penting
- 858 -
- 859 -

860 PENILAIAN

Meliputi: Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian, Ujian Dinas, Penilaian Kekayaan Pribadi dan Rehabilitasi

- 861 Penghargaan
 - .1 Bintang/Satya Lencana
 - .2 Kenaikan Pangkat Anumerta
 - .3 Kenaikan Gaji Istimewa
 - .4 Hadiah Berupa Uang
 - .5 Pegawai Teladan
- 862 Hukuman
 - .1 Teguran / Peringatan
 - .2 Penundaan Kenaikan Gaji
 - .3 Penurunan Pangkat
 - .4 Pemindahan

Catatan: Pemberhentian untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat lihat 887 dan 888
- 863 Konduite, DP3, Disiplin Pegawai
- 864 Ujian Dinas
 - .1 Tingkat I
 - .2 Tingkat II
 - .3 Tingkat III
- 865 Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri
Meliputi: Petunjuk pelaksanaan hidup sederhana, penilaian kekayaan pribadi (LP2P)
- 866 Rehabilitasi/Pengaktifan Kembali
- 867 -
- 868 -
- 869 -

870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN

Meliputi: Formasi, *Bezetting*, Registrasi, Daftar Riwayat Pekerjaan, Hak, Penggajian, Sumpah Janji, dan Korps Pegawai.

- 871 Formasi
- 872 *Bezetting*
- 873 Registrasi

- .1 NIP
- .2 Karpeg
- .3 Legitimasi/tanda pengenal
- .4 Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis/Karsu
- 874 Daftar Riwayat Pekerjaan
 - .1 Tanggal Lahir
 - .2 Penggantian nama
 - .3 Kepartaian/Organisasi
- 875 Kewenangan Mutasi Kepegawaian
 - .1 Pelimpahan Wewenang
 - .2 Specimen Tanda Tangan
- 876 Penggajian
 - 1. SKPP
- 877 Sumpah/Janji
- 878 Korps Kepegawaian
- 879 -

880 PEMBERHENTIAN

Meliputi pemberhentian/pemberhentian atas permintaan sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain, dengan diberi uang pesangon, uang tunggu untuk sementara waktu, dan pemberhentian tidak dengan hormat

- 881. Permintaan Sendiri
- 882. Dengan Hak Pensiun
 - .1 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan I
 - .2 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan II
 - .3 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan III
 - .4 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan IV
 - .5 Pensiun Janda/Duda
 - .6 Pensiun Yatim Piatu
 - .7 Uang Muka Pensiun
- 883 Karena Meninggal
 - .1 Karena Meninggal Dalam Tugas
- 884 Alasan
- 885 Uang Pesangon
- 886 Uang Tunggu
- 887 Untuk Sementara Waktu
- 888 Tidak Dengan Hormat
- 889 -

890 PENDIDIKAN PEGAWAI

Meliputi perencanaan, pendidikan reguler, pendidikan non-reguler, pendidikan ke-luar negeri, metode, tenaga pengajar, administrasi pendidikan, fasilitas dan sarana pendidikan.

- 891 Perencanaan
 - .1 Progam
 - .2 Kurikulum dan Silabi
 - .3 Proposal (TOR)
- 892 Pendidikan reguler/Kader
 - .1 IPDN
 - .2 Kursus-kursus reguler
- 893 Pendidikan dan pelatihan / non reguler
 - .1 LEMHANAS
 - .2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural, SPATI, SPAMEN, SPAMA, ADUMLA, ADUM
 - .3 Kursus-kursus/Penataran
 - .4 Diklat Teknik, Fungsional dan Manajemen Pemerintahan
 - .5 Diklat lainnya.
- 894 Pendidikan Keluar Negeri
 - .1 Berkesinambungan/Berkala/Bergelar

- .2 Non Gelar/Diploma
- 895 Metode
 - .1 Kuliah
 - .2 Ceramah, Simposiom
 - .3 Diskusi
 - .4 Kuliah Lapangan, Widya Wisata, KKN
 - .5 Kurikulum
 - .6 Karya Tulis
 - .7 Penugasan
 - .8 Gladi
- 896 Tenaga Pengajar
 - .1 Widya Iswara
 - .2 Permintaan Tenaga Pengajar
 - .3 Penambahan Tenaga pengajar
- 897 Administrasi Pendidikan
 - .1 Tahun Pelajaran
 - .2 Persyaratan meliputi Pendaftaran, Testing, Ujian
 - .3 STTP
 - .4 Penilaian Angka Kredit
 - .5 Laporan Pendidikan dan Pelatihan
- 898 Fasilitas Belajar
 - .1 Tunjangan Belajar
 - .2 Asrama
 - .3 Uang Makan
 - .4 Uang Transport
 - .5 Uang Buku
 - .6 Uang Ujian
 - .7 Uang Semester/Uang Kuliah
 - .8 Uang Saku
- 899 Sarana
 - .1 Bantuan Sarana Belajar
 - .2 Bantuan Alat-alat Tulis
 - .3 Bantuan Sarana Belajar Lainnya.

900 KEUANGAN

900 KEUANGAN

- 901 Nota Keuangan
- 902 APBN
- 903 APBD
- 904 Dana Alokasi Umum
- 905 Dana Alokasi Khusus
- 906 -
- 907 -
- 908 -

910 ANGGARAN

- 911 Rencana Kerja Anggaran (RKA)
- 912 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- 913 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
- 914 Surat Pencairan Dana (SPD)
- 915 Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)
- 916 Revisi
 - .1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - .2 Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)
- 917 -
- 918 -

920 OTORISASI/SKO

| | |
|-----|-------------|
| 921 | Rutin |
| 922 | Pembangunan |
| 923 | SIAP |
| 924 | Ralat SKO |
| 925 | - |
| 926 | - |
| 927 | - |

| | |
|------------|-----------------------------|
| 930 | VERIFIKASI |
| 931 | SPM Rutin (Daftar P8) |
| 932 | SPM Pembangunan (Daftar P8) |
| 933 | Penerimaan (Daftar P6.P7) |
| 934 | SPJ Rutin |
| 935 | SPJ Pembangunan |
| 936 | Nota Pemeriksaan |
| 937 | SP Pemindahan Pembukuan |
| 938 | - |
| 939 | - |

| | |
|------------|----------------------------------|
| 940 | AKUNTANSI |
| 941 | Penyusunan Perhitungan Anggaran |
| 942 | Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) |
| 943 | Rekonsiliasi |
| 944 | Realisasi Anggaran |
| 945 | Prognosis |
| 946 | Neraca |

| | |
|------------|---|
| 950 | PERBENDAHRAAN |
| 951 | Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TPTGR) |
| 952 | Pengelola Keuangan Daerah |
| 953 | Pengangkatan / Penggantian Pengguna Anggaran (PA) dan Pengangkatan / Penggantian Bendahara Pengeluaran |
| 954 | Pengangkatan/Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu dan Pengangkatan / Penghentian Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| 955 | Specimen Tanda Tangan |
| 956 | Surat Tagihan Piutang |
| 957 | - |
| 958 | - |
| 959 | - |

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 960 | PEMBINAAN KEBENDAHARAAN |
| 961 | Pemeriksaan Keuangan |
| 962 | Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan |
| 963 | Laporan Keuangan Bendaharawan |
| 964 | - |
| 965 | - |
| 966 | - |

| | |
|------------|--|
| 970 | PENDAPATAN |
| 971 | Perimbangan Keuangan |
| 972 | Subsidi |
| 973 | Pajak |
| 974 | Retribusi |
| 975 | Bea |
| 976 | Cukai |
| 977 | Pungutan |
| 978 | Bantuan Presiden, Menteri, dan Bantuan lainnya |
| 979 | Hibah |
| 980 | Dana Bagi Hasil |
| 981 | Bantuan Keuangan |

982 Bantuan Sosial
983 Lain-lain Pendapatan

990

BENDAHARAWAN PEMBELANJAAN

991 Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
992 Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
993 Surat Perintah Membayar (SPM)
994 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
995 -

KODE PEMBANTU

Kode pembantu di bawah ini tidak bisa dipakai tersendiri, tetapi dapat dipakai sebagai pelengkap dari yang manapun dengan menambahkan di belakangnya tiap kode.

- Contoh : Seminar penerbitan : 481.06
Statistik produksi padi : 521.110.7
Survey kehutanan : 522.021
- 01 PERENCANAAN
 - 02 PENELITIAN
 - 03 PENDIDIKAN
 - 04 LAPORAN
 - 05 TEAM PANITIA
 - 06 SEMINAR
 - 07 STATISTIK
 - 08 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 - 09 -
- 01 Perencanaan
 - 02 Penelitian
 - 03 Survey
 - 04 Riset
 - 05 Pendidikan, penataan, kursus, ceramah, simposium, santiaji
 - 04 Laporan
 - 041 Sewaktu-waktu
 - 042 Monografi
 - 043 Pengaduan
 - 05 Panitia, Team, Dewan, Badan
 - 06 Seminar, Workshop, Lokakarya, Raker, Kongres
 - 07 Statistik
 - 071 Sensus, Cacah Jiwa
 - 08 Peraturan Perundang-undangan
 - 09 -

VII. Cara Penggunaan

1. Untuk memahami pola klasifikasi terlebih dahulu harus memahami perincian pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antara masalah dengan anak masalahnya pada pola dengan memperhatikan efek dari prinsip berjenjang.

Tiap kode, kecuali kode pokok masalah pada perincian pertama, merupakan bagian dari sub ordinat dari kode atasnya. Untuk mendapatkan gambaran yang benar tentang masalah 412.31 harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagian dari 412.3. Selanjutnya diketahui bahwa 412.3 merupakan bagian dari 412, 412 bagian dari 410, dan 410 bagian dari 400. Di samping itu, perlu diperhatikan kekuasaan kelas 000.

Contoh:

- 400 Kesejahteraan Rakyat (perincian pertama).
- 410 Pembangunan Desa (perincian kedua).
- 411 -
- 412 Perekonomian Desa (perincian ketiga)
- 412.1 -
- 3.3 Koperasi Desa (perincian keempat)
- 31.31 BUUD (perincian kelima)

2. Untuk dapat mengklasifikasi surat dengan kode yang setepat-tepatnya haruslah dipahami benar masalah yang dikandungnya, dari sudut pandang masalah itu disajikan.

Untuk menentukan masalah dalam surat tidak selalu mudah. Pada umumnya “perihal” surat yang dicantumkan di bagian kiri atas surat memang ada hubungannya dengan masalah surat, tetapi kerap kali “perihal” tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat, oleh karena itu, untuk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan memahami masalah yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat, bahwa penemuan kembali surat tergantung pada ketepatan pemberian kode.

3. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah. Masalah-masalah itu dapat merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah-masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu, harus berhati-hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok.
4. Pemberian kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih terperinci. Masalah peraturan Kabupaten/Kota dapat secara berturut-turut diberi kode:
 - a. 188.342 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. 188.34 Peraturan Daerah
 - c. 188.3 Peraturan
 - d. 188 Peraturan Perundang-Undangan

Untuk instansi yang besar dapat mempergunakan pemberian kode dimaksud huruf (a) sedangkan makin kecil suatu instansi dapat mempergunakan kode dimaksud huruf (b) atau huruf (c) yang lebih sederhana, dan untuk instansi kecil, misalnya Kecamatan dapat mempergunakan kode dimaksud huruf (d).

5. Kode Pembantu
Kode pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri, tetapi ditambahkan di belakang kode yang memerlukan perincian lebih lanjut. Dengan ditambahkan kode pembantu, maka kode dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Contoh:

| | |
|---------|------------------------------------|
| 591 | Tata Guna Tanah |
| 02 | Kode pembantu penelitian |
| 591.02 | Penelitian Tata Guna Tanah |
| 413.1 | Pemukiman kembali penduduk |
| .06 | Kode pembantu seminar |
| 413.106 | Seminar pemukiman kembali penduduk |

6. Kode Wilayah
Sebagaimana diuraikan pada bab II.7, kode wilayah dipergunakan untuk memperinci lebih lanjut arsip yang jumlahnya sangat besar dan untuk keperluannya penyusunan berkas. Di kantor Pusat Departemen Dalam Negeri Arsip Kepegawaian jumlahnya sangat besar, oleh karena itu, memerlukan perincian dengan kode wilayah, dengan cara menempatkan kode wilayah di belakang angka kode pokok masalah.

Contoh:

| | |
|--------|-----------------------------|
| 121.43 | Gubernur Kalimantan Selatan |
| 121 | Gubernur Bali |

Dengan dipergunakannya kode wilayah, kesulitan menata arsip yang jumlahnya sangat besar itu dapat dipecahkan karena arsip berada pada *file* masing-masing Provinsi.

7. Kode wilayah dimaksud hanya dipakai oleh Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri, dan tidak dapat dipakai oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Bagi Daerah Provinsi dapat membentuk kode wilayah sendiri untuk Kabupaten di wilayahnya.

8. Sebelum memutuskan untuk membentuk kode wilayah tersebut, harus dipikirkan apakah hal itu memang benar-benar diperlukan oleh Provinsi. Penyusunan kode wilayah menganut prinsip desimal dan setelah tersusun secara mantap disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimuat dalam pola klasifikasi edisi yang akan datang.
9. Penggunaan kode wilayah tidak dapat digabungkan begitu saja pada kode-kode seperti penggunaan kode pembantu, tetapi hanya digunakan pada kode-kode di mana tercantum petunjuk-petunjuk tambahan kode wilayah.
10. Menyusun Kode
Untuk memperoleh kode yang spesifik, kode-kode masalah yang satu dapat digabungkan dengan kode-kode masalah yang lain. Cara penggabungan ini dapat dilihat contohnya pada kode 050 dan 700.
Perencanaan maupun proyek pembangunan dapat meliputi semua bidang kegiatan, oleh karena itu, untuk memperoleh kode yang terinci maka kode 050 dapat disambungkan dengan seluruh perincian kode dalam pola dari 000 sampai dengan 900.
Begitu juga pengawasan 700 yang meliputi bidang apapun dapat digabungkan dengan perincian kode dalam pola.
11. Apabila pada kode ada petunjuk tambahan perincian berarti harus menambahkan kode dari pola yang satu pada kode pola yang lain.

Contoh I :

055 Proyek Bidang Perekonomian
511.2 Pasar
055.112 Proyek Pembangunan Pasar

Contoh II :

056 Proyek Bidang Pekerjaan Umum
630 Jembatan
056.3 Proyek Jembatan (angka 0 paling belakang sesudah titik desimal dihilangkan).

12. Ada beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan dengan dua macam kode, dan dua kode yang berlainan itu sama-sama benar.
Contoh :
 - a. Peraturan Pemerintah Tentang Pensiun, bisa diklasifikasikan dengan kode 188.31 Peraturan Pemerintah atau 882.08 Peraturan tentang Pensiun. Masalah pemberhentian dengan pensiun (882), ditambah dengan kode pembantu untuk peraturan perundang-undangan (08).
 - b. Penelitian penghasilan pamong desa, dapat diklasifikasikan 070 (Penelitian) atau 142.02 (Penelitian Penghasilan Pamong Desa). Masalahnya penghasilan pamong desa (142) ditambah dengan kode pembantu untuk penelitian (02).

Kedua cara pengklasifikasian ini sama-sama benar. Cara ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan pada penataan berkas. Jika penataan berkas akan dilakukan dengan cara mengelompokkan semua jenis Peraturan Pemerintah, atau semua kegiatan penelitian, maka arsip diklasifikasikan tanpa kode pembantu, tetapi jika penataan berkas dilakukan berdasarkan masalahnya, maka yang diklasifikasikan ialah masalahnya ditambah dengan kode pembantu.

13. Tunjuk Silang

Jika dijumpai surat yang mengandung dua masalah dan masalah tersebut mempunyai tekanan yang sama beratnya, maka dapat diatasi dengan jalan membuat kartu tunjuk silang. Surat tersebut diklasifikasikan dengan dua kode. Satu kode diisikan pada kartu kendali dan satu kode lagi diisikan pada kartu tunjuk silang.

Dengan demikian maka penemuan kembali surat dimaksud dapat dilakukan dengan dua arah. Surat tentang "persawahan untuk transmigrasi" dapat diberi kode 521.5 (persawahan) dengan tunjuk silang : 475 (transmigrasi) atau sebaliknya. Perlu diperhatikan, bahwa penggunaan tunjuk silang terbatas pada masalah yang memang sangat penting.

14. Indeks Kaitan

Untuk memudahkan menyelusuri kode-kode disusun indeks kaitan. Indeks kaitan adalah himpunan nama-nama masalah yang disusun sesuai pola klasifikasi dan urutan abjad dengan ketentuan posisi kode indeks kaitan di belakang masalah sedangkan pola klasifikasi di depan masalah.

BUPATI TRENGGALEK,

MULYADI WR